

## ANALISIS PERILAKU DAN STRATEGI PENGRAJIN TEMPE DALAM MENGHADAPI FLUKTUASI HARGA KEDELAI

Sri Murwanti<sup>1)</sup>, Muhammad Sholahuddin<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
email: sri.murwanti@ums.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
email: muhammad.sholahuddin@ums.ac.id

### *Abstract*

*The price of soybean in Indonesia some times have soared uncontrollable. The producer (especially micro enterprises) of tofu and tempe are no longer able to produce in that situation. Consequently the amount of tofu and tempe are rarely in the market, meanwhile they are one of the important needs of Indonesian people. In fact, the government adopted a policy of instant such as remove import duties on imported soybeans. The policy was not strategic and could be fatal, because the country would be flooded by soybean imports. While farmers were getting ready to go out of business. With quantitative and qualitative approaches, this paper analyzed regarding (1) the impact of fluctuations in the price of soybean on tempe producers empirically, using descriptive analysis (2) critical assessment of government policies in addressing soybean price fluctuations with macroeconomic approach. The method of this analysis was exploration of literature. This analysis concluded that (1) there is a difference in terms of the level of selling price relating to soybean price fluctuations. (2) The main factors that cause fluctuations associated with the government's policies were : there were some weak role of government in the process of agricultural intensification and expansion as well. It was also in the case of agricultural import policies that are not pro-ordinary people.*

**Keywords:** price, soybean, regulation, intensification, import

### 1. PENDAHULUAN

Industri tempe seringkali mengalami masalah fluktuasi harga kedelai yang digunakan sebagai bahan baku utamanya. Harganya cenderung naik, sedangkan harga jual tempe sukar untuk dinaikan. Berdasarkan wawancara dengan pengrajin tempe di Sukoharjo (18/02/2012) dan data biro pusat statistik (2011), harga tertinggi kedelai sejak tahun 2000 sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut; 2000: Rp 3.167; 2001: Rp 3.730; 2002: Rp 3.717; Rp 3.949, Rp 4.449, Rp 4.912, Rp 5.101, Rp 7.000, 2008: Rp 7.500; 2009: Rp 7063; 2010: Rp 6500 (subsidi); 2011: Rp 7000 (subsidi).

Pada tahun 2012, harga kedelai meningkat terus sampai rata-rata mencapai 6.25% di pasar domestik. Sementara sampai bulan Juli 2012, menurut kementerian perdagangan ada peningkatan harga rata-rata

import kedelai sampai 7.6% (Statistik Kementerian Perdagangan, 2012). Jika dibandingkan dengan data GEM-Bank Dunia (2012), mulai bulan Juni 2012 sampai akhir Juli 2012 menunjukkan harga pasar kedelai di perdagangan internasional meningkat 26.8%. Kenaikan harga tersebut diduga karena perubahan iklim global terutama di negara pengekspor terbesar kedelai yaitu Amerika Latin.

John P. Slette dan Ibnu E. Wiyono (2012) menyatakan bahwa industri tempe dan tahu mengkonsumsi 88 persen total persediaan kedelai di Indonesia. Mulai bulan Juni 2012 harga produksi tempe dan tahu meningkat 30 persen per kilogram dikarenakan kenaikan harga kedelai.

Bagi pengrajin tempe, tetap memproduksi dikhawatirkan tidak memberi keuntungan nyata, berhenti produksi akan kehilangan

pelanggan. Dampak dari kenaikan harga kedelai secara terus menerus, berakibat kepada berkurangnya kemampuan pengrajin untuk terus memproduksi, terutama pengrajin yang memiliki modal terbatas.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu sentra industri pengrajin tempe, diantaranya yaitu di desa Babad (Manang, Grogol), Nguter, Mojolaban, Weru dan Sanggrahan. Dengan adanya peningkatan harga kedelai yang terus meningkat akhir-akhir ini mengakibatkan usaha tempe penduduk setempat menjadi berkurang karena kekurangan modal untuk meneruskan usaha tersebut.

Dalam bulan Juli 2012 harga kedelai mencapai Rp 8.000 dari harga biasa Rp 5.000-. Jika kenaikan harga tersebut tetap berlanjut, maka dikhawatirkan banyak produsen tempe dan tahu tidak dapat melanjutkan usahanya dikarenakan pendapatan tidak dapat digunakan untuk menutupi kenaikan biaya produksi. Sementara, pemerintah telah mengambil tindakan instan seperti pengurangan tarif impor kedelai dari 5% menjadi nol persen. Namun anehnya kebijakan tersebut tidak serta merta menurunkan harga pasar kedelai di daerah secara signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat dibahas dalam penelitian ini berhubungan dengan dampak kenaikan harga kedelai, yaitu : (1) Bagaimana dampak kenaikan harga kedelai terhadap pendapatan yang diterima pengrajin tempe?; (2) Strategi apa yang dilakukan oleh produsen tempe dalam mensiasati kenaikan harga kedelai?

Tujuan penelitian ini adalah:(1) Menganalisis dampak kenaikan harga kedelai terhadap pendapatan yang diterima pengrajin tempe; (2) Menganalisis strategi penyesuaian yang dilakukan oleh para pengrajin tempe untuk mempertahankan usahanya.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Usaha Kecil

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

sedang mendefinisikan usaha mikro, kecil, sedang dan besar berdasarkan jumlah asset dan omzet sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Sedang

Klp Usaha	Kriteria	
	ASSET	OMZET
Mikro		Maks. 300J
Kecil	> 50J - 500J	300 J- 2,5 M
i Sedang	500J - 10M	2,5 M - 50 M

Sumber: *Diolah dari UU No. 20 tahun 2008*

Berdasarkan uraian tersebut, maka kriteria usaha kecil yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

Menurut Suryana (2003), usaha kecil memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri, beberapa kekuatan yang dimiliki adalah: (1) Kebebasan untuk bertindak. Bila ada perubahan produk, teknologi, atau alat, usaha kecil dapat melakukan penyesuaian dengan cepat; (2) Fleksibel, usaha kecil sangat luwes dapat menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi setempat; (3) Tidak mudah goncang, karena sumber daya yang digunakan kebanyakan lokal, yang harganya relatif lebih murah, dan tidak banyak terpengaruh oleh nilai dolar.

Sedangkan kelemahan usaha kecil dapat dibagi dua: (1) Kelemahan struktural, adalah kelemahan usaha kecil dalam bidang manajemen seperti pengendalian mutu, organisasi, teknologi, modal, dan pasar. Kelemahan struktural yang satu dengan yang lainnya saling terkait, yang kemudian membentuk lingkaran ketergantungan.; (2) Kelemahan kultural adalah kelemahan dalam budaya perusahaan yang kurang mencerminkan perusahaan sebagai *Corporate Culture*. Kelemahan kultural mengakibatkan kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan, pemasaran dan bahan baku.

Menurut Urata (dalam Adiningsih, 2009) diantaranya karena UMKM seringkali tidak dapat lepas dari dua masalah utama, yaitu finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah finansial utama

adalah kekurangsesuaian (mismatch) antara dana yang tersedia dan yang bisa diakses. Selain itu, tak ada pendekatan sistematis dalam pendanaan; biaya transaksi yang tinggi, prosedur kredit yang akhirnya menyita banyak waktu padahal nilai kredit yang dikucurkan kecil; kurang akses ke sumber dana formal; bunga kredit untuk investasi dan modal kerja cukup tinggi; dan banyak UMKM yang belum bankable.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-finansial) menurut Adiningsih (2009) antaranya adalah : kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan, kurangnya pengetahuan atcan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya, informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk, mengembangkan SDM, kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi . Disamping itu menurut Tambunan (2009) UKM juga menghadapi permasalahan ekspor dan linkage antar perusahaan.

### **Konsep Analisis Efisiensi Teknis dan Inefisiensi Teknis**

Tujuan suatu usaha adalah untuk meningkatkan produksi dan keuntungan. Asumsi dasar dari efisiensi adalah untuk mencapai keuntungan maksimum dengan biaya minimum. Kedua tujuan tersebut merupakan faktor penentu bagi produsen dalam pengambilan keputusan untuk usahanya. Dalam pengambilan keputusan suatu usaha, seorang pengrajin yang rasional akan bersedia menggunakan input selama nilai tambah yang dihasilkan oleh tambahan input tersebut sama atau lebih besar dengan tambahan biaya yang diakibatkan oleh tambahan input tersebut. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan

input yang digunakan dalam suatu proses produksi.

Coelli, Rao dan Battese (1998), menyatakan bahwa konsep efisiensi dibedakan menjadi tiga, yaitu : 1) efisiensi teknis (*technical efficiency*), 2) efisiensi harga (*price efficiency*), 3) efisiensi ekonomis (*economic efficiency*).

Efisiensi teknis dapat diukur dengan pendekatan dari sisi output dan sisi input. Pengukuran efisiensi teknis dari sisi output merupakan rasio dari output observasi terhadap output batas. Indek efisiensi ini digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur efisiensi teknis di dalam *stochastic frontier*. Pengukuran efisiensi teknis dari sisi input merupakan rasio dari input atau biaya batas (*frontier*) terhadap input atau biaya observasi. Bentuk umum dari ukuran efisiensi teknis yang dicapai oleh observasi ke-*i* pada waktu ke-*t* (Coelli, Rao dan Battese, 1998).

### **Faktor-faktor Penentu Efisiensi**

Dalam kontek ekonomi produksi, efisiensi bersumber dari efisiensi teknis, efisiensi harga (alokatif), dan efisiensi ekonomi. Namun dalam penelitian ini hanya akan menganalisis efisiensi teknis. Efisiensi teknis bersumber dari faktor internal (faktor yang dapat dikendalikan oleh pengrajin) dan eksternal (tidak dapat dikendalikan), yaitu perubahan teknologi secara netral yang tidak merubah proporsi faktor produksi dan tidak merubah daya substitusi teknis antar input. Oleh karena faktor eksternal berada diluar kendali pengrajin maka dianggap "*given*" contoh: iklim, hama, harga, infrastruktur (Coelli, Rao dan Battese, 1998).

Faktor internal berkaitan erat dengan kapabilitas manajerial dalam suatu usaha. Termasuk dalam hal ini adalah tingkat penguasaan teknologi budidaya serta kemampuan mengolah informasi yang relevan dengan usahanya sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat. Faktor-faktor seperti pengalaman, dan pendidikan merupakan indikator penting terkait dengan kemampuan

manajerial petani termasuk juga dalam kemampuannya mengadopsi teknologi dan mengelola usahanya sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

Mengenai biaya, biaya dapat dibagi sesuai dengan sifat-sifatnya. Sifat biaya terbagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dalam hal-hal tertentu, ada biaya-biaya yang sifatnya merupakan kombinasi dari biaya tetap dan biaya variabel, yaitu biaya semi variabel.

Secara sederhana biaya tetap berhubungan dengan waktu dan tidak berhubungan dengan tingkat produksi. Pembayarannya didasarkan pada periode akuntansi tertentu dan besarnya adalah sama. Sampai dengan jumlah output tertentu biaya ini secara total tidak berubah. Sedangkan biaya variabel berhubungan dengan tingkat produksi atau penjualan karena besarnya ditentukan oleh besar volume produksi atau penjualan yang dilakukan. Biaya semi variabel mempunyai ciri-ciri gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Karena itu di dalam perhitungan *break even point* hanya kedua bentuk biaya yang pertama saja yang digunakan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel.

### Roadmap Penelitian

Tempe adalah sejenis makanan khas Indonesia, yang dijadikan lauk-pauk pada saat makan nasi. Rasanya yang gurih, dengan kandungan gizi yang tinggi, menjadikan makanan ini digemari banyak orang. Bahkan saat ini tempe telah diterima oleh masyarakat internasional, lebih-lebih oleh kaum vegetarian.

Kedelai yang dipakai untuk membuat tempe harus memiliki mutu yang baik, kedelai jenis ini masih harus di impor dari Amerika, untuk meringankan para pengrajin tempe, pemerintah memberi subsidi, sehingga pengrajin dapat membeli dengan harga yang lebih murah. Namun ketika pemerintah mengurangi bahkan menghapus subsidi, banyak industri tempe yang mengalami kesulitan, bahkan banyak yang tidak dapat memproduksi lagi. Hal ini

disebabkan terbatasnya modal pengrajin dan lemahnya daya beli masyarakat.

Peta jalan (roadmap) penelitian yang telah dan akan dilakukan terkait dengan tema tersebut adalah sebagai berikut :

Tahun 2000 : Dampak Krisis ekonomi pada industri tempe. Tahun 2006: Dampak kenaikan harga BBM terhadap pendapatan usaha pengrajin tempe. Tahun 2008 : Analisis Efisiensi usaha Tani. Tahun 2010 : Analisis Efisiensi pengrajin tempe Jawa Barat. **Tahun 2012 : Analisis Efisiensi dan pendapatan usaha pada pengrajin tempe Sukoharjo**

Apretty (2000) melakukan penelitian mengenai dampak krisis ekonomi pada industri tempe skala kecil di Desa Citeureup, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 telah menyebabkan kelompok industri terutama yang bahan bakunya didominasi impor mengalami kerugian. Bahan baku kedelai pada industri tempe yang mahal menyebabkan biaya produksi menjadi mahal dan dalam waktu yang bersamaan daya beli masyarakat menjadi menurun. Kenaikan harga bahan baku juga diikuti dengan kenaikan harga input lainnya seperti ragi dan pembungkunya (plastik dan daun) dan juga kenaikan upah tenaga kerja. Kenaikan upah tenaga kerja menyebabkan pengurangan penggunaan tenaga kerja untuk mengurangi kenaikan biaya produksi.

Penelitian ini ingin menganalisis keragaan industri tempe dan strategi industri tempe agar dapat bertahan dalam kondisi krisis tersebut. Analisis data menggunakan Metode Hayami untuk menganalisis nilai tambah pada industri tempe. Selain analisis nilai tambah, juga digunakan *before and after analysis*. Peningkatan nilai tambah tidak menjamin meningkatnya keuntungan bagi pengrajin tempe. Tingkat keuntungan yang diperoleh industri tempe menurun dari 83,592 persen menjadi 77,788 persen atau turun sebesar 6,94 persen.

Latifah (2006) melakukan penelitian mengenai dampak kenaikan harga BBM

terhadap pendapatan usaha pengrajin tempe pada anggota Koperasi Primer Tahu Tempe (Primkopti) di Kelurahan Cilendek Kotamadya Bogor. Penelitian ini menganalisis tentang pendapatan usaha dan efisiensi penggunaan faktor produksi (kedelai, ragi, tenaga kerja, plastik, daun, minyak tanah, dan kayu bakar). Hasil pengujian yang dilakukan setelah kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM menyebabkan biaya produksi meningkat sebesar 7,1 persen. Penerimaan usaha pengrajin tempe mengalami penurunan sebesar 4,6 persen. Meskipun harga tempe sudah dinaikkan, akan tetapi besarnya kenaikan harga sebesar 10,8 persen tidak sebanding dengan besarnya penurunan jumlah produksi sebesar 12,9 persen. Kenaikan harga BBM mengakibatkan pendapatan pengrajin pada daerah penelitian menurun sebesar 37,2 persen.

Alat analisis yang digunakan yaitu analisis fungsi produksi Cobb Douglas pada saat sebelum dan setelah kenaikan harga BBM, nilai P-Value sebelum kenaikan harga BBM secara statistik tidak nyata dalam memberikan pengaruh terhadap hasil output pada variabel daun, minyak tanah dan kayu. Hal ini dikarenakan daun sulit didapat dalam kualitas yang baik, minyak tanah tidak memiliki pengaruh jika jumlah kedelai tidak ditambah, dan kayu merupakan bahan bakar alternatif jika minyak tanah tidak tersedia. Sedangkan nilai P-Value setelah kenaikan harga BBM, variabel ragi, tenaga kerja, minyak tanah dan kayu secara statistik tidak nyata dalam memberikan pengaruh terhadap hasil output. Hal ini disebabkan ragi inokulum yang biasa digunakan pengrajin berpindah menjadi ragi campuran untuk memperkecil biaya dan tenaga kerja harus dikurangi karena penurunan skala usaha sehingga lebih efisien dengan mengurangi khususnya tenaga kerja luar.

Maryono (2008) juga melakukan penelitian mengenai analisis efisiensi teknis dan pendapatan usahatani padi program benih bersertifikat dengan menggunakan pendekatan *stochastic production frontier* di

Desa Pasirtalaga, Kabupaten Karawang. *Stochastic production frontier* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat efisiensi teknis. Penelitian ini membandingkan antara sebelum (masa tanam I) dan setelah (masa tanam II) pelaksanaan program benih padi bersertifikat.

Nilai elastisitas jumlah benih pada masa tanam II bernilai negatif. Hal ini diduga terjadi akibat penggunaan benih yang melebihi batas yang diharuskan yaitu 25 kg per ha, sedangkan kondisi dilapangan, petani menggunakan benih dengan dosis 26,60 kg per ha. Variabel TSP pada masa tanam II juga mempunyai nilai elastisitas negatif dan berpengaruh nyata, hal ini kemungkinan terjadi karena residu pupuk akibat pemupukan sebelumnya. Sehingga lahan sawah tidak bisa menyerap kandungan TSP dengan baik. Untuk variabel yang lain pada masa tanam II memiliki nilai yang positif, tetapi yang mempunyai pengaruh nyata adalah urea, obat-obatan dan tenaga kerja.

Hasil pendugaan efek inefisiensi teknis menunjukkan bahwa pada masa tanam II faktor-faktor yang nyata berpengaruh dalam menjelaskan inefisiensi teknis di dalam proses produksi petani responden adalah pengalaman, pendidikan dan rasio urea-TSP. Berdasarkan R/C rasio atas biaya total setelah program juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan sebelum program. R/C rasio atas biaya total setelah program sebesar mengalami peningkatan sebesar 16,5 persen. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan seakan-akan program ini memberikan manfaat bagi petani responden. Pendapatan riil atas biaya total masa tanam II juga lebih kecil dibandingkan masa tanam I yaitu sebesar 9,9 persen. Kondisi ini terjadi karena kondisi perberasan nasional sedang mengalami kekurangan stok beras sehingga harga beras termasuk juga harga gabah meningkat.

Hal ini karena bahan baku yang digunakan adalah kedelai impor. Berdasarkan teori ekonomi produksi, kenaikan harga kedelai yang menyebabkan



### Hipotesis

1. Kenaikan harga kedelai menyebabkan kenaikan harga input dan kenaikan biaya produksi tempe karena kedelai merupakan komponen biaya dengan persentase atas total biaya terbesar.
2. Kenaikan harga kedelai menyebabkan jumlah produksi tempe yang dihasilkan menurun karena adanya pengurangan penggunaan input produksi.
3. Kenaikan harga kedelai akan menyebabkan pendapatan usaha pengrajin tempe menjadi berkurang.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di desa Babad (Manang, Grogol), Nguter, Mojolaban, Weru dan Sanggrahan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah sentra pengrajin tempe di Sukoharjo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – Agustus 2012.

#### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berupa profil pengusaha dan keragaan usaha tempe sebelum dan setelah kenaikan harga kedelai, diperoleh melalui survei dengan menggunakan teknik wawancara dipandu dengan kuesioner. Survei yang dilakukan adalah survei mengenai kondisi usaha responden pada saat sebelum dan setelah kenaikan harga kedelai. Data sekunder berupa data industri kecil dan kerajinan rumahtangga, dokumen dan laporan diperoleh dari instansi-instansi terkait, Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian Kabupaten Sukoharjo, serta buku-buku dan literatur-literatur terkait.

#### Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini populasi merupakan para pengrajin tempe di desa Babad (Manang, Grogol) berjumlah 58 pengrajin, Nguter (30 pengrajin), Mojolaban (45 pengrajin), Weru (35 pengrajin) dan

Sanggrahan (75 pengrajin) Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan populasi sekitar 253 pengrajin tempe.

Pemilihan sampel dengan kriteria utama yaitu lama usaha lebih dari satu tahun agar dapat melihat dampak kenaikan harga kedelai yang terjadi. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 sampel untuk memenuhi aturan umum secara statistik yaitu jumlah sampel  $\geq 30$  karena sudah terdistribusi normal dan dapat digunakan untuk memprediksi populasi yang diteliti. Metode yang digunakan yaitu *simple random sampling* dengan cara memberi nomor setiap pengrajin pada populasi kemudian dikocok hingga mendapat 30 sampel terpilih. Metode ini dipilih karena populasinya relatif homogen sehingga memiliki peluang yang sama.

#### Alat analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Analisis Imbangan Penerimaan dan Biaya (R/C Rasio)*

Analisis R/C rasio atau analisis imbangan penerimaan dan biaya adalah perbandingan antara jumlah penerimaan dengan pengeluaran totalnya. Hal ini menunjukkan berapa besar penerimaan yang diperoleh sebagai manfaat disetiap rupiah yang dikeluarkan. Maka makin besar nilai R/C makin baik usaha tersebut. Untuk menghasilkan tingkat keberhasilan pengrajin, digunakan rumus sebagai berikut :

$$C R/rasio = \frac{\text{Pengeluaran Total}}{\text{Penerimaan Total}}$$

Usaha dikategorikan efisien jika memiliki nilai R/C rasio  $> 1$ , artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih besar dari pada tambahan biaya atau secara sederhana kegiatan usaha tempe tersebut menguntungkan. Sebaliknya jika nilai R/C rasio  $< 1$  berarti kegiatan usaha tempe yang dilakukan dikategorikan tidak efisien karena setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan

penerimaan yang lebih kecil atau kegiatan usahatani itu merugikan. Jika nilai R/C rasio = 1 berarti kegiatan usaha tempe berada pada kondisi impas dimana usaha memberikan jumlah penerimaan yang sama dengan jumlah yang dikeluarkan.

Nilai *revenue* (penerimaan) dan *cost* (biaya) diperlukan agar dapat menghitung R/C rasio dan sekaligus menghitung nilai pendapatan usaha tempe. Pendapatan usaha tempe adalah terdiri dari pendapatan total dan pendapatan tunai. Pendapatan total adalah jumlah total penerimaan dikurangi dengan jumlah total biaya. Pendapatan tunai adalah jumlah total penerimaan dikurangi dengan jumlah biaya tunai.

Wawancara mendalam, digunakan untuk mengetahui strategi pensiasatan yang dilakukan oleh para pengrajin tempe ketika harga bahan baku yaitu kedelai mengalami kenaikan harga.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Deskripsi Responden

Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 30 responden pengrajin tempe, mayoritas mereka adalah laki-laki. Ini dapat dilihat dari jumlah responden hanya ada 2 perempuan dari 30 responden pengrajin tempe. Kemungkinan alasannya adalah karena kesadaran peran laki-laki bahwa mereka mempunyai kewajiban bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, sementara perempuan sebagai seorang istri berperan membantu suaminya dalam berbisnis.

Responden terbesar adalah mereka pada kelompok usia 30-39 tahun sebanyak 40 persen (12 responden). Responden terbesar selanjutnya adalah kelompok usia 40-49 tahun sebanyak 26.67%. Sedangkan kelompok umur 20-29 tahun dan 50-59 tahun masing-masing kelompok tersebut berjumlah 16.67 persen (5 responden). Jadi, sebaran responden berdistribusi normal.

Adapun jangka waktu mereka menjalankan bisnis mereka berkisar antara 1-5 tahun ada 13,79 persen. Profesi mereka sebelumnya bermacam-macam, ada yang tukang listrik atau pekerjaan tidak tetap. Mereka berharap usaha tempe mempunyai prospek yang cerah karena potensi pasar yang baik dan tidak memerlukan keahlian terlalu tinggi.

Responden yang telah menjalankan bisnis ini selama 6-10 tahun ada sekitar 17,24 persen. Sedangkan mayoritas responden telah menjalankan usahanya ini selama lebih dari 15 tahun sebanyak 68,97 persen (21 orang).

Ada 62 persen (18 responden) memilih sebagai pengrajin tempe dengan alasan sebagai bisnis keluarga turun temurun, sisanya beralasan karena modalnya kecil (6,9 persen), potensi pasar yang luas (20,7 persen) dan tidak memerlukan keahlian yang tinggi (13,8 persen).

##### Analisis Revenue-Cost

Hasil analisis Revenue-Cost tersebut sebagaimana tertulis dalam table berikut:

Tabel 2 Pendapatan dan Rasio R/C

Pendapatan	Sebelum	Setelah	Pertum-buhan %
Operating Income	228,020.51	105,461.95	-53.75
Net Income	224,412.97	102,159.12	-54.48
<b>Rasio R/C</b>			
R/C of cash cost	1.37	1.26	-8.06
R/C of total cost	1.30	1.19	-8.46

Analisis keseimbangan antara total pendapatan dengan total biaya adalah salah satu metode untuk mengukur keuntungan bisnis. Kriteria analisisnya adalah jika nilai R/C lebih besar daripada 1, maka usaha tersebut masih mengalami keuntungan dan layak jalan karena nilai pendapatan lebih besar daripada total biaya. Jika nilai R/C lebih kecil dari 1, artinya usahanya rugi dan kurang layak untuk dijalankan. Ketika R/C sama dengan 1 menunjukkan bahwa usaha tersebut dalam keadaan titik impas (break even point) karena total pendapatan sama dengan total biaya. Ada dua cara penghitungan analisis R/C, yaitu R/C pengeluaran kas dan R/C pada total biaya.

Hasil R/C pada biaya setelah kenaikan harga kedelai mengalami penurunan sebesar 6.47 persen. Padahal sebelum kenaikan harga kedelai nilai R/C sebesar 1.37. Artinya, setiap Rp 1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,37. Setelah terjadi kenaikan harga kedelai, R/C pada pengeluaran kas menurun 1,26. Hal ini berarti setiap Rp 1 pengeluaran kas menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,26. Penurunan nilai R/C pada biaya kas karena penurunan total pendapatan lebih besar daripada reduksi biaya kas.

Ketika harga kedelai naik, Nilai R/C biaya total menurun dari 1,3 menjadi 1,19. Hal ini berarti setiap Rp 1 total biaya menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,19. Penurunan nilai R/C total biaya menyebabkan penurunan nilai total pendapatan. Penurunan tersebut lebih besar daripada pengurangan total biaya.

Penurunan jumlah kesediaan kedelai dunia disebabkan beberapa faktor. (1) Penurunan produksi kedelai Amerika Selatan pada pertengahan tahun 2011/2012. (2) Kelanjutan Permintaan kedelai yang tinggi di Cina (3) Perubahan musim panas dan kering AS yang tidak sesuai jadwal pada pertengahan tahun 2012.

Permasalahan bahan kebutuhan pokok pangan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah terhadap para petani. Di satu sisi Indonesia mempunyai potensi pertanian yang subur dan produktif

terbaik kelima di dunia. Ironisnya, Indonesia masih tetap mengimpor bahan pangan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal.

1. Kelemahan peran pemerintah dalam proses intensifikasi pertanian. Hal ini menyebabkan penurunan produksi, padahal intensifikasi terutama dalam hal peningkatan kualitas bibit unggul dan teknologi pengolahan lahan secara efisien, mendorong peningkatan produktivitas tanah pertanian.

Produksi kedelai tahun 2012 lebih rendah dibandingkan tahun 2010 dari 907.000 ton menjadi 779.800 ton. Jumlah tersebut tidak mencukupi kebutuhan kedelai sebesar 2,2 juta ton per tahun. Penurunan produksi terkait dengan proses intensifikasi disebabkan karena harga pupuk yang semakin mahal menyebabkan peningkatan biaya produksi. Banyak petani kedelai yang merugi, akibatnya mereka banyak yang menghentikan penanaman kedelai.

Kenaikan harga bibit dan pupuk merupakan dampak dari pengurangan subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Sebagai perbandingan, subsidi tersebut untuk tahun 2010 sebesar Rp 18,4 triliun, sementara tahun 2011 anggaran tersebut turun menjadi Rp 16,4 triliun. Terlebih subsidi bibit mengalami penurunan, pada tahun 2010 dari Rp 2,3 triliun menjadi Rp 120,3 milyar pada tahun anggaran 2011. Penurunan subsidi menyebabkan kenaikan harga bibit dan pupuk yang berdampak pada penurunan margin keuntungan petani, bahkan ada beberapa petani yang mengalami kerugian.

2. Peran pemerintah yang lemah dalam ekstensifikasi pertanian. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (2010) luas lahan pertanian semakin berkurang setiap tahun sebesar 12,6 ribu hektar di pulau Jawa. Sementara berdasarkan Tim Keamanan Pangan Nasional, ada 110 ribu hektar lahan pertanian alih fungsi menjadi lahan pemukiman.

3. Kebijakan pemerintah dalam produksi makanan lebih berpihak kepada pasar. Ketika harga kedelai naik, pemerintah mengambil kebijakan yang relatif mudah yaitu lebih memilih mengimpor kedelai dari luar negeri dibandingkan membuat kebijakan untuk

meningkatkan produksi domestik melalui inovasi dan kreativitas intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sebenarnya kebijakan impor tersebut merupakan konsekuensi dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan IMF untuk menerapkan liberalisasi perdagangan. Sebagai contoh adalah negara Haiti yang juga telah menyepakati perjanjian tersebut, dengan melakukan pemotongan tarif impor dari 35 % menjadi 3%. Hasilnya adalah adanya peningkatan impor sebesar 150% dari tahun 1995 sampai tahun 2003.

## 5. SIMPULAN

Kenaikan harga kedelai ternyata berdampak pada kesulitan para pengrajin tempe dalam mempertahankan usahanya jika tidak kreatif. Namun pendapatan mereka tetap saja berkurang. Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menstabilkan harga kedelai.

Pemerintah Indonesia sebenarnya mampu menyelesaikan masalah fluktuasi harga kedelai dengan baik dengan memfokuskan inovasi teknologi dan ketrampilan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi. Komitmen untuk bersinergi antara pemerintah, pelaku bisnis, petani dan peneliti atau akademisi merupakan bagian faktor dalam menentukan kesuksesan harga kedelai yang stabil.

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan pembuktian indikasi kartel dalam impor kedelai.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada peserta 1st University Research Colloquium 2015 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan saran dalam artikel penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada beberapa mahasiswa FEB UMS yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

## REFERENSI

- Hadipurnomo, 2000. Dampak Kebijakan Produksi dan Perdagangan terhadap Permintaan dan Penawaran Kedelai di Indonesia. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Jonh P Slette, Ibnu E Wiyono, 2012, *Impact of Soybean Price Rally on Indonesian Soy Business*, Report: Global Agricultural Information Network-USDA Foreign Agricultural Service, Journal of Agricultural Economics, 55(3):pp.581-611.
- Latifah, F. N. 2006. Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Pendapatan Usaha Pengrajin Tempe (Kasus Pada Anggota Koperasi Primer Tahu Tempe (Primkopti) Kelurahan Cilendek, Kotamadya Bogor) [skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Fakultas Pertanian. Bogor.
- Maryono. 2008. Analisis Efisiensi Teknis dan Pendapatan Usahatani Padi Program Benih Bersertifikat: Pendekatan *Stochastic Production Frontier* (Studi Kasus di Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang) [skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Fakultas Pertanian. Bogor.
- Purnamasari. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi dan Impor Kedelai di Indonesia. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Riyanti, BPD. 2003. *Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suryana. 2003. *Kewirausahaan: Pedoman praktis, kiat dan proses menuju sukses*. Ed ke-1. Jakarta: Salemba Empat.
- Internet**  
 BPS Indonesia (<http://bps.go.id>)  
 Data Statistik Kementerian Perdagangan [http://www.kemendag.go.id/harga\\_kebutuhan\\_pokok\\_nasional/](http://www.kemendag.go.id/harga_kebutuhan_pokok_nasional/), accessed 15 September 2012  
 GEM – Worldbank Databank (<http://databank.worldbank.org/data/home.aspx>)

## AKSEPSIBILITAS BANK BAGI KELOMPOK WANITA PEREMPUAN MISKIN

Sri Suryaningsum<sup>1)</sup>, Moch. Irhas Effendy<sup>2)</sup>, Raden Hendry Gusaptono<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi, UPN Veteran Yogyakarta

<sup>1</sup>email: suryaningsumsri@yahoo.com

<sup>2</sup>email: m\_irhaseffendi@upnyk.ac.id

<sup>3</sup>email: tono\_hendri@yahoo.com

### *Abstract*

*Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris yang The destitute women group is hardly to access the bank. The goal of the survey is to describe the real condition of the destitute women group which works as domestic-servant and scavenger. Their income is below than one million rupiahs. The undergoing survey method is in the form of deep interview and facilitation. The submitted solution is a policy formulation for the regulator and stakeholders in poverty alleviation in order to accomodate the need of this destitute group.*

**Keywords:** *destitute women, domestic-servant, scavenger, finance access, regulator*

### 1. PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesulitan dalam aksesibilitas keuangan bagi kelompok perempuan miskin. Kelompok perempuan miskin tidak memiliki kemudahan dalam aksesibilitas perbankan. Perbankan masih dianggap sebagai hal yang tidak mungkin terjangkau. Penelitian ini sangat penting karena mampu mengungkapkan kondisi real yang dihadapi oleh kelompok perempuan miskin dalam mengakses keuangan perbankan. Kelompok perempuan miskin yang menjadi responden penelitian ini adalah kelompok perempuan pembantu rumah tangga dan kelompok perempuan pemulung.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pilihan yang dilakukan dalam menyiasati ketidakmampuan mengakses perbankan adalah sebagaiberikut kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih memilih berutang kepada perkumpulan arisan. Persepsi kelompok ini adalah bahwa hutang di tempat arisan memiliki bunga yang ringan. Padahal setelah dilakukan analisis ternyata bunganya adalah 20% per tahun. Hal ini jauh lebih mahal dari bunga bank secara umum.

Kedua, adalah kelompok perempuan miskin pemulung. Kelompok perempuan miskin pemulung lebih memilih berhutang pada taukenya/juragannya. Hutang di tempat juragan ada yang dikenai bunga dan ada yang tidak berbunga. Namun demikian juragan ini menentukan syarat bahwa semua hasil pulungan ini harus disetor ke juragan tempat berhutang. Hal yang terjadi adalah ketika setor, harga yang ditetapkan oleh juragan ini lebih rendah dibandingkan di tempat lainnya.

Suryaningsum & Sugiarti (2014a, b) menyatakan bahwa kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih teratur administrasi dan pola hidupnya dibandingkan dengan kelompok perempuan miskin pemulung. Suryaningsum & Sugiarti (2014a) memaparkan bahwa permasalahan dalam bidang ekonomi untuk kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga dan kelompok perempuan miskin pemulung memiliki penghasilan sama atau kurang dari satu juta rupiah. Kelompok komunitas kaum wanita pekerja rumah tangga umumnya waktunya habis bekerja di rumah tempatnya bekerja atau majikannya, sehingga tidak memikirkan kehidupan pribadinya apalagi lingkungan, kesehatan, dan ekonominya karena cash flownya yang sangat pendek yaitu harian. Untuk itu tim peneliti mencoba

memaparkan hasil penelitian yang berkaitan dengan aksesibilitas perbankan kelompok komunitas kaum wanita pekerja rumah tangga di desa Depok, kabupaten Sleman.

Komunitas kelompok miskin pemulung, khususnya komunitas pemulung dan pengamen tidak tersentuh program-program pemerintah karena hidup tidak terstruktur dalam tatanan masyarakat luas. Hidup mengelompok dan memencil yang jauh dari akses pemerintahan walaupun tinggal di kota. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, maka bentuk model pengabdian dengan pembagian ini yang paling pas. Namun demikian pembagian perlengkapan penunjang ini harus sesuai dengan kondisi real, karakteristik, dan kondisi responden. Komunitas miskin seperti ini harus mendapat bantuan secara ekonomi, kesehatan, dan akses. Khususnya kelompok miskin komunitas pemulung dan pengamen.

Kegiatan penelitian dan pendampingan dilaksanakan pada bulan Maret 2014 sd Oktober 2014. Ada delapan (8) responden yang menjadi subjek penelitian ini. Empat (4) orang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dan empat (4) orang berprofesi sebagai pemulung. Karakteristik responden adalah sebagai berikut empat responden orang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga ini memiliki latar belakang pendidikan tertinggi adalah tingkat SLTP. Satu responden berumur 30 tahun dengan satu anak, satu responden berumur 46 tahun dengan dua anak, dua responden lainnya berumur 45 tahun dengan masing-masing memiliki 3 anak dan 4 anak. Kegiatan hariannya adalah membantu rumah tangga dengan durasi waktu jam 05.00 sd 17.00 WIB. Upah yang diterima kurang dari 1 juta/bulan. Tidak suka membaca, tapi sering menghabiskan waktu malamnya dengan menonton TV. Keempat responden memiliki kecenderungan lebih intens dengan gambar. Karakteristik kesehatan, satu responden tidak bermasalah dalam arti sehat. Sedangkan tiga responden memiliki postur tinggi badan kurang dari 150cm dan gemuk, dengan rata-rata tensi yang tergolong tinggi yaitu 150/100. Rumah sangat sempit berwujud petak. Karakteristik ekonomi, kesehatan, pola

pikir, dan kecenderungan visual mempengaruhi perlakuan pembagian perlengkapan yang direncanakan.

**Kelompok kedua**, yaitu wanita komunitas pemulung dan pengamen berdomisili di dekat Sungai TambakBayan. Empat responden ini memiliki latar belakang pendidikan tertinggi adalah tingkat SLTP. Satu responden sebagai pengamen berumur 25 tahun dengan satu anak, satu responden sebagai pemulung berumur 54 tahun dengan tiga anak (satu anak hilang) anak, dua responden lainnya sebagai pengamen berumur 45 tahun dengan masing-masing memiliki 2 anak dan 3 anak. Kegiatan hariannya adalah memulung dan mengamen. Dua responden terakhir ini bercerai. Untuk kegiatan pemulungan dilakukan pukul 05.00 sd 17.00 WIB. Untuk kegiatan pengamen, ada yang melakukan pekerjaan mengamen pada pagi sd sore dan malam. Kedua kelompok ini memiliki penghasilan perbulan tidak tentu, namun demikian secara rata-rata penghasilan yang diperoleh kurang dari 1 juta/ bulan. Tidak suka membaca, tapi sering menghabiskan waktu dengan menonton TV. Keempat responden memiliki kecenderungan lebih intens dengan gambar.

Penduduk Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang besar. Hal ini sesuai dengan Suryaningsum, dkk 2014a, b dan Ratnawati, 2011. Suryaningsum, dkk 2014b menyatakan bahwa Indonesia memerlukan tata kelola pengentasan yang baik, sedangkan Suryaningsum dkk 2014a menyatakan bahwa dana keistimewaan akan memiliki *multiplier effect* bagi pengentasan kemiskinan di DIY dan pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan tingkat nasional. Ratnawati, 2011 menyatakan bahwa tahun 2004 jumlah penduduk miskin absolute tercatat sebesar 36,1 juta jiwa atau 16,66% dari total populasi. Dari jumlah tersebut ternyata lebih banyak penduduk perempuan miskin dibanding laki-laki, dan jumlahnya makin bertambah dari tahun ke tahun. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kemiskinan sangat dekat dengan perempuan. Berdasar geografi, orang miskin lebih banyak di desa daripada di kota. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan perempuan

miskin perdesaan menyangkut pada persoalan bagaimana upaya pemberdayaan perempuan miskin perdesaan melalui kewirausahaan dapat menjamin para pelaku ekonomi rakyat memperoleh apa yang menjadi hak mereka, khususnya kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Aksepsibilitas Bank

Akses keuangan bagi kelompok miskin sangat sulit. Hal ini sesuai dengan Zulminarni, 2004 yang menyatakan bahwa persoalan kemiskinan perempuan bukan hanya sekedar persoalan akses terhadap sumberdaya keuangan semata. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang kompleks, dalam hal ini persoalan perempuan miskin adalah persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal. Ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kondisi utama yang mengantarkan perempuan pada kemiskinan yang berkepanjangan. Sebenarnya upaya pemberdayaan perempuan menjadi kesepakatan dan agenda dunia sejak tiga dekade yang lalu. Kelompok miskin ini lebih mengandalkan sumber-sumber keuangan alternatif seperti hibah program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial dan LSM, rentenir (bank keliling, bank titil, bank plecit, dsb), kerabat dan tetangga. Dalam hal ini Zulminarni, 2004 menyatakan bahwa akibatnya, mereka menjadi tergantung, usaha tidak berkesinambungan, terjerat hutang, dan tetap dalam lingkaran kemiskinan.

Teuku, 2006 menyatakan bahwa ditemukan bahwa laki-laki lebih cenderung menghabiskan sebagian pendapatan mereka untuk kenikmatan pribadi. Ditemukan pula bahwa perempuan memiliki risiko kredit yang lebih baik dari pada laki-laki dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sumberdana yang kecil.

Munculnya isu bahwa perempuan miskin lebih penting untuk diprioritaskan dalam hal perilaku yang lebih hemat. Alasan utama mengapa memilih perempuan sebagai

pelanggan prioritas adalah karena Grameen Bank menugaskan dirinya untuk memberikan pinjaman kepada yang paling miskin. Zulminarni, 2004 yang menyatakan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan, dan tidak kurang dari 6 juta mereka adalah kepala rumah tangga miskin dengan pendapatan rata-rata dibawah 10,000 per hari. Untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarga, umunya mereka bekerja pada sektor informal—perdagangan dan jasa, sektor pertanian—buruh tani, dan buruh pabrik. Mereka sulit mendapatkan akses sumberdaya termasuk sumberdaya keuangan seperti kredit dari lembaga keuangan yang ada karena dianggap tidak layak, lokasi terpencil, tidak ada penjamin, yang sebagian persoalan ini juga terkait dengan issue gender.

Memfasilitasi dan memberdayakan perempuan miskin menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan Ratnawati, 2011 yang menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berhubungan yang berpengaruh dalam pemberdayaan perempuan yaitu, kesejahteraan, akses sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol. Apapun upaya yang akan dilakukan dalam memberdayakan perempuan, sudah semestinya mencakup kelima hal di atas, termasuk dalam pengembangan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu sumber daya ekonomi bagi mereka. Mekanisme yang dilakukan adalah memfasilitasi perempuan miskin di satu wilayah untuk berkelompok dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam di kelompoknya merupakan langkah awal yang dilakukan selama ini. Setiap kelompok menyepakati bersama berapa jumlah simpanan-simpanan yang harus mereka lakukan, bagaimana caranya, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Mereka memang harus mulai dengan menyimpan, bukan meminjam. Mekanisme yang lainnya adalah membuka akses sumberdaya; dengan berkelompok dan berkoperasi mereka diakui keberadaannya, dapat akses informasi, dapat mengakses berbagai sumberdaya termasuk dana, pendidikan dan pelatihan melalui berbagai program yang dikembangkan di wilayahnya.

Dalam hal memberikan fasilitas akses kepada perempuan miskin, hal yang perlu diperhatikan adalah perempuan miskin perdesaan umumnya bersifat sangat tertutup, sehingga pemberdayaan untuk mereka membutuhkan kesabaran dan pendekatan secara personal/kelompok yang dilakukan secara intens serta melalui suasana informal. Perilaku dan kondisi yang dibangun adalah berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aktivitas dalam kelompok mereka membangun kebersamaan, belajar mengambil keputusan, belajar berorganisasi. Selain itu kesadaran kolektif terhadap posisi dan keberadaan mereka dalam masyarakat setara dengan yang lain juga terbangun seiring dengan terbangunnya keyakinan diri mereka. Lebih lanjut adalah mempunyai kontrol terhadap diri dan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, secara kolektif mereka kemudian dapat ikut mengontrol proses pengambilan keputusan dan alokasi sumberdaya dalam masyarakat karena mereka telah terbiasa dalam kelompoknya. Selain itu, kelompok-kelompok ini juga telah member dampak sosial yang positif dalam masyarakatnya karena mereka juga menyisihkan sebagian keuntungan simpan pinjam untuk kegiatan sosial seperti beasiswa anak sekolah, santunan bagi orang perempuan tua dan tidak mampu bekerja, korban bencana dan sebagainya.

Konsep aksesibilitas akan sukses jika dilaksanakan dengan partisipasi aktif kelompok miskin. Hal ini sesuai dengan konsep yang dinyatakan oleh Widodo, dkk 2011 menyakini bahwa model pemberdayaan perempuan nelayan di kawasan pesisir dapat dikembangkan melalui 3 (tiga) tahap, yakni : pengembangan kelompok (*community development*), pra-pengembangan usaha (*pre-business development*), dan pengembangan usaha (*business development*). Konsep Pengembangan Kelompok dibangun dengan konsep *bottom up*. Program pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien harus dilakukan dengan mengubah konsep pemberdayaan dari *Top-Down* menjadi *Bottom-Up*. Hal ini disebabkan karena konsep *top-down*, cenderung mensamaratakan masing-masing wilayah

sasaran kegiatan, tanpa melakukan identifikasi potensi yang ada di wilayah sasaran. Kenyataan yang terjadi di lapangan, konsep tersebut menuai kegagalan, yang berakibat pada menurunnya partisipasi dan motivasi masyarakat untuk mengikuti program-program lain di masa mendatang, karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses awal penetapan program kegiatan. Sebaliknya, sistem *bottom-up*, diyakini akan berhasil karena masyarakat dilibatkan dalam setiap proses dan tahapan kegiatan program pemberdayaan.

### **Kelompok Wanita Miskin**

Perempuan miskin dikategorikan oleh Kementerian Sosial dalam Astuti 2012 sebagai wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), yaitu wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ciri-ciri/kriteria dari wanita rawan sosial ekonomi adalah wanita sebagai sumber utama mencari nafkah/tulang punggung keluarga, janda, dan berpenghasilan rendah. Pemberdayaan perempuan miskin sebagai proses terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan miskin dalam pengentasan kemiskinan.

Soetrisno, 1997; Shiva, 1997; Mies, 1986; Vandana, 1997 menjelaskan bahwa (1) Konteks masyarakat miskin pada umumnya banyak ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (di luar komunitas basis; outsider). Yang tentunya dengan mempertimbangkan unsur pencapaian keberhasilan dalam berbagai bidang. Persoalan yang sering muncul adalah bahwa kebijakan itu dibuat semata-mata berdasarkan model pembangunan colonial-patriaki yang mengutamakan hasil produksi dan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekologi. Dalam pemberdayaan yang transformative, rakyat (dan kaum perempuan) dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan itu. Melibatkan peran perempuan sangat penting. Banyak keuntungan yang dapat diraih. Seperti contoh berikut ini kaum

perempuan-lah yang paling dekat dengan alam, yang dalam kesehariannya memelihara dan menjaga kelangsungan kehidupan dari alam. Maka jika kebijakan pembangunan itu mengeksploitasi dan merusak alam, sama artinya menggusur perempuan dari sumber penghidupannya, termasuk kesehatan dan ketahanan pangan bagi keluarganya.

Dalam konteks tertentu pemberian bantuan dan fasilitas langsung memang perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan Soetrisno, 1997 dan Shiva, 1997 bahwa masyarakat miskin tidak akan mampu mengatasi kemiskinannya tanpa adanya kesadaran bahwa hanya dirinyalah yang mampu menjadi penolong bagi dirinya sendiri, sehingga diperlukan fasilitas bagi lahirnya komunitas basis atau kelompok-kelompok lokal yang berfungsi sebagai pengontrol kebijakan dan pendamping bagi kelompoknya untuk terus melakukan pemberdayaan.

Semangat, perilaku, budaya, etos kerja, pola pikir, kemauan yang besar dan gaya hidup sangat menentukan keberhasilan. Maka dalam proses penyadaran dan pembelajaran dalam kelompok diperlukan dialog untuk menentukan bersama apa-apa yang dapat membawa mereka menuju keberhasilan. Dalam konteks memahami orang miskin dan kemiskinan tidak bisa hanya mendasarkan diri pada pandangan stereotype atas etos kerja yang menganggap bahwa orang miskin itu malas dan tidak hemat. Faktor multidimensi dalam hal ini sesuai dengan Loekman Soetrisno yang menyatakan bahwa ketidakberuntungan orang miskin haruslah diletakkan dalam konteks yang lebih luas: model pembangunan yang dianut, ketidakadilan social yang mengendap dalam system-struktur, dan berbagai kebijakkan sosio-ekonomi-politik yang tidak menguntungkan bagi si lemah dan miskin.

Sutrisno (1997) dan Usman (2004) juga menyatakan bahwa ada berbagai pandangan mengenai apa itu kemiskinan dan siapa orang miskin. Dan masing-masing memiliki tolok ukur dan kreteria yang berbeda untuk melihat kemiskinan dan orang miskin. Fokus utama dalam pembahasan mengenai perempuan dan

kemiskinan dalam hal ini perempuan sebagai bagian dari komunitas kaum miskin juga merupakan pelaku sekaligus korban dari ketidakadilan konsep pembangunan, serta kelompok yang ikut berperan dalam menjaga keselarasan dan kelangsungan kehidupan generasi kita selanjutnya. Ketika kaum perempuan dapat memberdayakan dirinya dan komunitasnya, maka masyarakat akan terbantu untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan itu sendiri.

Kusumaningrum, 2012 menyatakan bahwa ketimpangan gender yang mengakibatkan tertinggalnya kaum perempuan terhadap laki-laki di Indonesia. Dalam Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga dinyatakan bahwa pemerintah menangani kondisi tertinggalnya kaum perempuan terhadap laki-laki ini kurang serius. Buktinya adalah anggaran yang rendah dalam berbagai program-program peningkatan kesejahteraan perempuan. Kebijakan penganggaran untuk mensejahterakan perempuan dan anak masih dibawah 0,5%, dan diperbesar pada angka penekanan laju penduduk. Program pemberdayaan perempuan yang disusun oleh pemerintah, di samping anggarannya yang begitu kecil, juga sebatas kepada program pengarusutamaan gender di setiap kementerian ataupun lembaga. Kelompok perempuan selalu menjadi kelompok termiskin dari rakyat miskin, karena selain termiskinkan oleh kebijakan, mereka juga termiskinkan oleh stereotip dan kultur yang masih memandang mereka sebagai subordinat laki-laki sehingga termarjinalkan dari segala akses sumberdaya. Salah satu penyebabnya adalah konstruksi budaya patriaki. Hal ini juga sesuai dengan Astuti, 2012. Selain itu data dalam hal perbandingan pekerjaan menunjukkan bahwa konstruksi budaya patriarki ini telah berdampak pada ketimpangan gender yang berlarut-larut. Berdasarkan data BPS 2000, perbedaan kemampuan membaca menulis antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih tinggi dengan perbandingan 56,9% : 88,1%. Ketimpangan ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap timpangnya perbandingan laki-laki dan

perempuan yang bekerja pada sektor informal dengan perbandingan 29,6% : 39,2%.

### 3. METODE PENELITIAN

Desain yang dilakukan adalah sesuai dengan skema Suryaningsum dan Sugiarti 2014b dan didukung oleh hasil penelitian Suryaningsum dkk, 2014c. Skema tersebut adalah berupa kegiatan penelitian dan pendampingan yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2014 sd Oktober 2014. Ada delapan (8) responden yang menjadi subjek penelitian ini. Empat (4) orang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dan empat orang berprofesi sebagai pemulung. Desain penelitian dan pendampingan dengan memberikan dan membantu berbagai kebutuhan pokok untuk delapan responden ini dilakukan karena tidak mudah mendapatkan informasi dari responden. Ada rasa curiga jika orang luar masuk dalam komunitas mereka terutama bagi kelompok responden yang berprofesi pemulung. Kelompok pemulung ini memiliki berbagai keterbatasan dalam bermasyarakat. Kelompok perempuan miskin pemulung secara struktural mereka tidak punya kelompok dalam sistem masyarakat. Mereka hidup terpisah dari masyarakat, sehingga inilah yang membuat mereka memiliki rasa curiga dan berbagai perilaku yang berbeda dengan masyarakat luas.

Kelompok pertama terdiri dari empat orang responden yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Latar belakang pendidikan tertinggi adalah tingkat SLTP. Satu responden berumur 30 tahun dengan satu anak, satu responden berumur 46 tahun dengan dua anak, dua responden lainnya berumur 45 tahun dengan masing-masing memiliki 3 anak dan 4 anak. Kegiatan hariannya adalah membantu rumah tangga dengan durasi waktu jam 05.00 sd 17.00 WIB. Upah yang diterima kurang dari 1 juta/ bulan. Tidak suka membaca, tapi sering menghabiskan waktu malamnya dengan menonton TV. Keempat responden memiliki kecenderungan lebih intens dengan gambar. Karakteristik kesehatan, satu responden tidak bermasalah dalam arti sehat. Sedangkan tiga

responden memiliki postur tinggi badan kurang dari 150cm dan gemuk, dengan rata-rata tensi yang tergolong tinggi yaitu 150/100. Rumah sangat sempit berwujud petak. Karakteristik ekonomi, kesehatan, pola pikir, dan kecenderungan visual mempengaruhi perlakuan pembagian perlengkapan yang direncanakan.

**Kelompok kedua**, yaitu wanita komunitas pemulung dan pengamen berdomisili di dekat Sungai TambakBayan. Empat responden ini memiliki latar belakang pendidikan tertinggi adalah tingkat SLTP. Satu responden sebagai pengamen berumur 25 tahun dengan satu anak, satu responden sebagai pemulung berumur 54 tahun dengan tiga anak (satu anak hilang) anak, dua responden lainnya sebagai pengamen berumur 45 tahun dengan masing-masing memiliki 2 anak dan 3 anak. Kegiatan hariannya adalah memulung dan mengamen. Dua responden terakhir ini bercerai. Untuk kegiatan pemulungan dilakukan pukul 05.00 sd 17.00 WIB. Untuk kegiatan pengamen, ada yang melakukan pekerjaan mengamen pada pagi sd sore dan malam. Penghasilan perbulan tidak tentu, namun demikian secara rata-rata penghasilan yang diperoleh kurang dari 1 juta/ bulan. Tidak suka membaca, tapi sering menghabiskan waktu dengan menonton TV. Keempat responden memiliki kecenderungan lebih intens dengan gambar

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedelapan responden menyatakan tidak pernah ke bank. Alasan yang dikemukakan adalah sebagaiberikut.

1. Bank dianggap sebagai tempat yang mewah dan “menakutkan”, karena itu pasti membayar mahal.
2. Hanya sedikit uang untuk ditabung.
3. Tidak paham dengan tata cara yang ada di bank.

Jika ada kesulitan keuangan, maka perilaku yang muncul adalah sebagaiberikut. Pilihan yang dilakukan oleh responden adalah sebagaiberikut.

1. Kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih memilih berutang kepada

- perkumpulan arisan. Persepsi kelompok ini adalah bahwa hutang di tempat arisan memiliki bunga yang ringan. Padahal setelah dilakukan analisis ternyata bunganya adalah 20% per tahun. Hal ini jauh lebih mahal dari bunga bank secara umum.
2. Kelompok perempuan miskin pemulung lebih memilih berhutang pada taukenya/juragannya. Hutang di tempat juragan ada yang dikenai bunga dan ada yang tidak berbunga. Namun demikian juragan ini menentukan syarat bahwa semua hasil pulungan ini harus disetor ke juragan tempat berhutang. Hal yang terjadi adalah ketika setor, harga yang ditetapkan oleh juragan ini lebih rendah dibandingkan di tempat lainnya.

Hal ini sesuai dengan Ratnawati, 2011 yang menyatakan bahwa golongan miskin cenderung memanfaatkan pelayanan tabungan melalui lembaga informal (kelompok arisan) yang dikelola oleh masyarakat sendiri akibat tidak dapat mengakses pelayanan bank. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi tabungan di kalangan golongan miskin yang belum terlayani. Faktor jauhnya jarak dan formalitas fasilitas tabungan yang disediakan bank membatasi akses masyarakat miskin terhadap tabungan bank. Lembaga formal non-bank, seperti koperasi, hanya menyediakan sangat sedikit fasilitas tabungan, sedangkan lembaga nonformal secara hukum tidak diperbolehkan untuk menarik tabungan dari masyarakat. Keragaman kebutuhan dan kondisi kehidupan golongan miskin turut mempengaruhi keragaman kebutuhan akan pelayanan keuangan mikro. Kecuali transfer, kebutuhan akan kredit, tabungan dan asuransi merupakan kebutuhan nyata dalam keseharian mereka.

Syarif, 2006, dan Usman dkk, 2004 menyatakan bahwa perempuan merupakan jumlah terbanyak dari kelompok yang terpinggirkan di antara yang paling miskin dari yang miskin. Dalam komunitas miskin seperti Bangladesh, di mana aturan keluarga tidak diterapkan dengan baik, sementara

tradisi menjadi lebih penting dari hukum kejadian di mana laki-laki meninggalkan isteri dan anak-anaknya merupakan hal yang biasa. Pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki dampak yang sangat besar terhadap terbentuknya keluarga yang stabil.

Berbagai pelayanan keuangan belum dinikmati oleh kelompok perempuan miskin pada responden penelitian ini, apalagi pelayanan asuransi formal belum menyentuh masyarakat miskin karena belum adanya layanan asuransi mikro. Secara umum bahwa kebutuhan akan tabungan dan asuransi, baik untuk menghadapi siklus musiman, kebutuhan yang berkaitan dengan peristiwa dalam kehidupan (kematian, perkawinan), maupun untuk investasi jangka panjang lebih banyak dipenuhi dari cara-cara tradisional seperti pemeliharaan ternak, penyimpanan hasil yang berlebih, pembentukan kelompok arisan dan simpan-pinjam, dan sistem pembiayaan bersama berdasarkan kekerabatan. Hal ini juga sesuai dengan Ratnawati 2011.

Jika perbankan masih dianggap tempat yang mewah dan “menakutkan” boleh jadi koperasi yang “benar” menjadi pilihan yang terbaik. Koperasi memiliki karakteristik melayani dari dan untuk anggota. Boleh jadi bentuk koperasi merupakan akses yang terbaik bagi kelompok perempuan miskin. Hal ini sesuai dengan Zulminarni, 2004 menyatakan bahwa paling tidak ada lima aspek yang saling berhubungan yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan yaitu, kesejahteraan, akses sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol. Apapun upaya yang akan dilakukan dalam memberdayakan perempuan, sudah semestinya mencakup kelima hal di atas, termasuk dalam pengembangan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu sumber daya ekonomi bagi mereka. Koperasi dipilih karena mempunyai prinsip-prinsip ekonomi dan sosial yang memungkinkan kelima aspek pemberdayaan diatas dapat dicakup. Dalam hal perbandingan dengan Grameen Bank memajukan akses perempuan miskin di Bangladesh perlu diteladanni. Garmeen bank tidak memperdulikan sistem perbankan di Bangladesh yang memperlakukan perempuan

sebagai peminjam kelas dua, Grameen Bank mampu menciptakan perbandingan 50-50 antara peminjam laki-laki dan perempuan. Tidak perlu waktu lama bagi Grameen Bank untuk melihat bahwa perempuan merupakan pihak yang lebih efektif untuk melakukan perubahan. Kalau ada pendapatan tambahan untuk keluarga melalui perempuan, maka makanan anak-anak, gizi dan kesehatan keluarga, serta perbaikan untuk rumah akan mendapatkan prioritas utama. Hal ini sesuai dengan Syarif, 2006, dan Usman dkk, 2004.

## 5. SIMPULAN

Aksesibilitas keuangan bagi kelompok perempuan miskin terjadi karena persepsi kelompok miskin bahwa Bank dianggap sebagai tempat yang mewah dan “menakutkan”, karena itu pasti membayar mahal. Alasan lain yang dikemukakan oleh responden adalah bahwa tidak ada uang untuk ditabung dan tidak paham dengan tata cara yang ada di bank.

Kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih memilih berutang kepada perkumpulan arisan. Persepsi kelompok ini adalah bahwa hutang di tempat arisan memiliki bunga yang ringan. Padahal setelah dilakukan analisis mendalam ternyata bunganya adalah 20% per tahun. Hal ini jauh lebih mahal dari bunga bank secara umum.

Kelompok perempuan miskin pemulung secara struktural mereka tidak punya kelompok dalam sistem masyarakat. Mereka hidup terpisah dari masyarakat sehingga lebih memilih berhutang pada taukenya/juragannya. Hutang di tempat juragan ada yang dikenai bunga dan ada yang tidak berbunga. Namun demikian juragan ini menentukan syarat bahwa semua hasil pulungan ini harus disetor ke juragan tempat berhutang. Hal yang terjadi adalah ketika setor, harga yang ditetapkan oleh juragan ini lebih rendah dibandingkan di tempat lainnya.

Kebijakan yang perlu dilakukan adalah membuat kebijakan yang lebih toleran dan pro-aktif terhadap kelompok perempuan miskin. Hal ini penting dilakukan karena sebenarnya kelompok perempuan miskin ini perlu ditolong dengan kebijakan yang

meringankan, jangan sampai mereka terjebak berulang-ulang dalam berbagai kredit tengkulak (baik arisan maupun dari juragannya dalam responden ini). Kredit-kredit tengkulak ini sebenarnya semakin memiskinkan kelompok ini. Jika sebenarnya mereka mampu membayar dalam berutang dengan bunga 20% pada kelompok arisan masyarakat dan kelompok pemulung mampu dibayar lebih rendah oleh juragannya, sebenarnya merekapun mampu mengakses berbagai skema keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dengan syarat lembaga keuangan membuat kebijakan yang memahami kondisi kelompok miskin perempuan. Dalam hal ini kebijakan yang dikemas dengan lebih humanis, disajikan dengan bahasa dan cara yang mereka pahami

## REFERENSI

- Astuti, Mulia. 2012. Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial Entrepreneurship (Studi Kasus di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Sosiokonsepia* Vol. 17, No. 03.
- Hastuti dan Dyah Respati. 2012. Naskah Jurnal Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan (Studi di Lereng Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta). Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- <http://news.okezone.com/read/2012/09/24/337/693969/perempuan-menjadi-kelompok-termiskin-dari-rakyat-miskin>
- Kusumaningrum, Dina. 2012. Perempuan menjadi kelompok termiskin dari rakyat miskin. *Okezone*. Senin, 24 September 2012.
- Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisus, Yogyakarta, 1997
- Maika, Amelia. Kiswanto, Eddy. 2007. Pemberdayaan Perempuan Miskin Pada Usaha Kecil di Perdesaan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro (Grameen Bank). Makalah ini

- disampaikan dalam seminar Bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Kamis 26 April 2007.
- Maria Mies, *Patriachy and Accumulation on a World Scale*, London: Zed Books, 1986
- Ratnawati, Susi. 2011. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Issn. 1978-4724 Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2, Desember 2011. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Kartika Surabaya
- Sucipto, Yeni. 2012. Perempuan Miskin. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. Sultan. 2014a. Penguatan Ekonomi Kebudayaan DIY Berbasis Anggaran Keuangan Danais. Prosiding Semnas FE UPNVY.
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. 2014b. Tata Kelola Pengentasan Kemiskinan. Gosyen Publishing.
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. Sultan. 2014c. Best Practice pengentasan Kemiskinan. Laporan PUPT DIKTI RI.
- Suryaningsum, Sri. Sugiari, Wiwik Dewi. 2014a. Manajemen Lingkungan Sehat Dan Bersih Serta Bernilai Ekonomi Bagi Wanita Pekerja Rumah Tangga. Prosiding Semnas UPNVY.
- Suryaningsum, Sri. Sugiari, Wiwik Dewi. 2014b. Manajemen Lingkungan Sehat Dan Bersih Serta Bernilai Ekonomi. Laporan Pengabdian IBM .DIKTI RI.
- Syarif, Teuku. Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006. Grameen Bank Membuktikan Perempuan Dan Orang Termiskin Dari Yang Miskin Punya Potensi Untuk Diberdayakan.
- Usman, Syaikh. Suharyo, L Widjajanti. Sulaksono, Bambang. Toyamah, Nina. Mawardi, M Sultan. Akhmadi. 2004. Keuangan mikro untuk masyarakat miskin di nusa tenggara timur. *Laporan Lapangan*. Smeru.
- Vandana, Shiva. 1997. *Bebas dari Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997
- Widodo, Slamet. Bustamam, Hendri. Soengkono. 2011. Tahun XXI, No. 1 April. Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Keluarga Nelayan Miskin Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Terpadu. *Majalah Ekonomi*
- Zulminarni, Nani. 2004. Lembaga Keuangan Mikro Dalam Kerangka Pemberdayaan Perempuan Miskin. workshop Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indonesia. GEMA PKM Indonesia dan BWTP, di Jakarta, 27 Agustus 2004.

## PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGUKURAN KESEJAHTERAAN SISWA

Usmi Karyani<sup>1</sup>, Nanik Prihartanti<sup>2</sup>, Wiwien Dinar Prastiti<sup>3</sup>, Rini Lestari<sup>4</sup>, Wisnu Sri Hertinjung<sup>5</sup>,  
Juliani Prasetyaningrum<sup>6</sup>, Susatyo Yuwono<sup>7</sup>, Partini<sup>8</sup>

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>1</sup>email: Usmi.Karyani@ums.ac.id

<sup>2</sup>email: Nanik.Prihartanti@ums.ac.id

<sup>3</sup>email: wiwien\_prastiti@ums.ac.id

<sup>4</sup>email: Rini.Lestari@ums.ac.id

<sup>5</sup>email: ws\_hertinjung@yahoo.com

<sup>6</sup>email: juliani@ums.ac.id

<sup>7</sup>email: Sustayo.Yuwono@ums.ac.id

<sup>8</sup>email: Partini@ums.ac.id

### Abstract

*The aim of this study is to develop an instrument that can be used to measure students wellbeing according to the context of student life. The instruments are arranged in behavioral scale. Item in the scale is based on six aspects of the student's wellbeing that were identified through indigenous wellbeing framework in a previous study conducted by Karyani, et al (2014). Psychometric methods used to determine the coefficient of content validity and the coefficient of discrimination of items. A total of 11 psychologists and psychometric expert provide an assessment of each item in the instrument to determine the content validity. Scales also tested to 398 junior high school students (M: 210, F: 188), aged between 12-16 years to determine the coefficient of determination of each item. The results of the study showed that the students wellbeing scale that developed in this study consist of 20-item which have a high coefficient of content validity and have a good discrimination coefficient. Distribution of item, coefficients validity and coefficients discrimination of each item are described in detail in this paper.*

**Keywords:** measurement, wellbeing, student

### 1. PENDAHULUAN

Selama dua dekade terakhir ini terjadi peningkatan minat terhadap psikologi positif. Hal ini berdampak pada terjadinya pergeseran penelitian psikologi di berbagai belahan dunia, termasuk pengukuran atribut psikologis. Dalam hal ini indikator-indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian psikologi mengalami perubahan, yang semula menggunakan cara pandang “deficit” atau negatif bergeser pada cara pandang yang lebih positif dengan memberikan penekanan terhadap sumber daya dan pemenuhan *wellbeing*<sup>1</sup> (Camfield, dkk,

2009). Hal yang sama terjadi pada pengembangan kebijakan, di mana kesejahteraan digunakan sebagai indikator untuk membantu memonitor kualitas hidup dan kebijakan (Ereaut & Whiting, 2008; Taylor, 2011), baik di negara maju maupun berkembang (Samman, 2007; Camfield, dkk, 2009; WHO, 2001; Unicef, 2012).

Salah satu isu menarik yang banyak mendapat perhatian adalah kesejahteraan pada anak dan dunia pendidikan. Dalam kebijakan bidang pendidikan di banyak negara kesejahteraan dijadikan sebagai indikator penting untuk menilai kualitas

<sup>1</sup> Istilah *wellbeing* dalam kosa kata Bahasa Indonesia belum dibuat padanannya, namun demikian para peneliti topik ini menterjemahkan *wellbeing* sebagai kesejahteraan (Hartanti, 2010;

Faturochman, 2012). Dalam tulisan ini istilah kesejahteraan digunakan sebagai padanan kata *wellbeing*

pendidikan (Petegem, dkk, 2008). Sistem pendidikan yang baik mampu membuat siswanya sejahtera. Kesejahteraan siswa merupakan urusan terpenting bagi sekolah karena terkait dengan derajat keefektifan fungsi siswa pada komunitas sekolah (Fraillon, 2004), mengambil peran utama dalam pembelajaran (South Australia Department of Education and Children's Service, 2005), dan mempengaruhi optimalisasi fungsi siswa di sekolah (Victorian Government, 2010). Dengan demikian pengukuran kesejahteraan siswa perlu dilakukan untuk memantau bagaimana dunia pendidikan pada umumnya dan sekolah khususnya telah melakukan tugas pentingnya.

Dalam pengukuran kesejahteraan subjektif perlu dikaitkan dengan indikator-indikator subjektif. Penggunaan indikator subjektif dibutuhkan karena memiliki keunggulan, diantaranya dapat digunakan untuk melakukan diagnosa awal terhadap kelompok masyarakat/individu yang memiliki kesejahteraan rendah serta untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap masyarakat (Thompson & Aked, 2009). Indikator subjektif apa yang digunakan tergantung pada pilihan cara pandang terhadap konsep kesejahteraan. Perspektif siswa mengenai kesejahteraan diperlukan untuk menyusun alat ukur. Oleh karena itu pengembangan instrumen kesejahteraan siswa ini akan disusun berdasarkan konsep yang telah ditemukan pada penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Karyani, dkk (2014).

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Dalam psikologi, kajian tentang kesejahteraan secara umum terbagi menjadi dua pandangan utama, yakni pandangan *hedonic* dan *eudaemonic*. Pandangan *eudaemonic* mengaitkan kesejahteraan dengan *human development* dan *flourishing*, dan dikenal sebagai kesejahteraan psikologis, sedangkan *hedonic* mengaitkan kesejahteraan dengan kebahagiaan, afek positif dan kepuasan hidup.

Pandangan *eudaemonic* menekankan kesejahteraan dari bagaimana individu mampu berfungsi dengan baik sementara pandangan *hedonic* menekankan pada derajat individu untuk merasa baik terhadap kehidupan. Dengan demikian, dalam pandangan *eudaemonic* upaya untuk meningkatkan kesejahteraan harus difokuskan pada bagaimana kemampuan dan kapasitas individu dikembangkan agar dapat menjadi orang/warga negara yang mampu berfungsi secara optimal, sedangkan *hedonic* fokus untuk memaksimalkan jumlah dan atau durasi perasaan positif dan menyenangkan (Samman, 2007; Dodge, 2012, Handerson, 2012).

Dalam pandangan *eudaemonic*, pengukuran kesejahteraan pada umumnya menggunakan 6 aspek. Keenam aspek tersebut terkait dengan kesejahteraan (psikologis), sehingga biasanya pengukuran dengan cara pandang *edudaemonic* dikenal dengan pengukuran kesejahteraan psikologis (*psychological wellbeing*). Keenam aspek yang diukur yakni kemandirian, penguasaan lingkungan, hubungan positif terhadap orang lain, memiliki tujuan hidup, pertumbuhan pribadi, dan penerimaan diri (Ryff, 1989). Sementara itu, pandangan *hedonic* mengaitkan kesejahteraan dengan persepsi subjektif terhadap kebahagiaan yang dinyatakan kepuasan terhadap hidup dan kemampuan untuk menyeimbangkan afek positif dan negatif (Diener, 2000). Dalam psikologi, pengukuran dengan pandangan ini dikenal dengan kesejahteraan subjektif (*subjective wellbeing*).

Konsep kesejahteraan cukup beragam. Dalam kajian di Barat, kesejahteraan secara umum merupakan integrasi dari pandangan *hedonic* dan *eudaemonic*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pollard & Lee (2003) yang mereview definisi kesejahteraan dari berbagai sumber. Berdasarkan review tersebut Pollard & Lee (2003) menyimpulkan bahwa kesejahteraan meliputi konsep positif dan ekologis yang mencakup tahap perkembangan kehidupan. Kesejahteraan anak terdiri dari fungsi fisik, kognitif, sosial emosi, serta memiliki dimensi objektif dan subjektif dalam hal ini perasaan puas yang

berhubungan dengan pemenuhan potensi-potensi yang dimilikinya. Selanjutnya dijelaskan oleh Pollard & Lee (2003) bahwa konsep kesejahteraan multidimensi dan tidak hanya dilihat dari indikator defisit (kurang). Ahli lain, Statham & Chase (2010) mengemukakan bahwa kesejahteraan anak meliputi aspek objektif maupun subjektif dari kehidupan anak. Aspek objektif kesejahteraan meliputi keadaan yang tampak jelas (seperti misalnya pendapatan keluarga, struktur keluarga, pendidikan, dan status kesehatan) maupun yang dipersepsikan oleh anak terhadap kehidupan mereka secara keseluruhan, sedangkan aspek subjektif merupakan indikator yang didasarkan pada pandangan anak terhadap aspek-aspek dari kehidupan anak seperti misalnya kebahagiaan, hubungan sosial dan kepuasan hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh Huebner, dkk (2003) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat lima ranah yang mempengaruhi kepuasan hidup anak, yakni: keluarga, teman-teman, sekolah, diri sendiri (*self*) dan lingkungan. Di Inggris, Ress dkk (2010) yang melakukan penelitian terhadap kesejahteraan anak menemukan 10 ranah penting, yakni: keluarga, teman-teman, kesehatan, penampilan, penggunaan waktu luang, masa depan, rumah, uang dan kepemilikan, sekolah, dan pilihan dalam hidup.

Para peneliti dan pemerhati kesejahteraan siswa memandang penting untuk menyusun definisi khusus yang dapat diterapkan kepada siswa. Sebagai contoh The Australian Council for Educational Research merumuskan kesejahteraan siswa sebagai derajat keefektifan fungsi siswa pada komunitas sekolah (Fraillon, 2004). Sementara itu Fraine, dkk (2005) menyatakan kesejahteraan sebagai keadaan di mana siswa merasa baik di lingkungan sekolah. Keefektifan fungsi siswa dilihat dari dua dimensi, yakni intrapersonal dan interpersonal. Dimensi intrapersonal merupakan internalisasi perasaan diri sebagai siswa dan efektifitas fungsinya dalam komunitas sekolah. Sementara itu dimensi interpersonal terkait dengan penilaian siswa

terhadap lingkungannya dan keefektifan fungsinya dalam komunitas sekolah (Fraillon, 2004). The Department of Education and Early Childhood Development Victoria Australia (Victorian General Report, 2010) yang melakukan kajian komprehensif terhadap kesejahteraan siswa, merumuskan kesejahteraan siswa sebagai sikap, suasana hati, kesehatan, resiliensi dan kepuasan siswa terhadap diri sendiri serta hubungan dengan orang lain dan pengalaman di sekolah.

Di Finlandia, Kanu & Rimpela (2002) mengembangkan model kesejahteraan sekolah dengan mengadopsi teori sosiologi mengenai kesejahteraan (*welfare*) dipadukan dengan konsep sejahtera (*well-being*) dalam entitas sekolah, sehingga kesejahteraan dikaitkan dengan pengajaran (*teaching*) dan pendidikan (*education*), dan dengan belajar (*learning*) dan prestasi (*achievement*). Konu & Rimpela (2002) menyimpulkan terdapat empat hal terkait dengan kesejahteraan siswa di sekolah yakni kondisi sekolah (fisik dan organisasi, layanan dan keamanan), relasi sosial (murid, guru, staf sekolah), pemenuhan diri (kesempatan belajar sesuai dengan kapabilitas, mendapatkan umpan balik, semangat), dan status kesehatan.

Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan siswa belum dijelaskan secara eksplisit dan terinci seperti yang tertuang dalam kebijakan pendidikan. Istilah tentang kesejahteraan yang ada adalah kesejahteraan anak yang terdapat dalam UU Nomor Nomor 4 Tahun 1979. Pada pasal 1 dikemukakan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Konsep tersebut perlu dioperasionalkan dalam konteks anak sebagai siswa supaya dapat dilakukan pengukuran untuk memonitor capaian kesejahteraan siswa.

Pengukuran kesejahteraan perlu menggunakan cara pandang populasi setempat (*indigenous*). Sebuah review terhadap hasil penelitian kualitatif mengenai kesejahteraan di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh Camfield, dkk. (2009) menunjukkan bahwa kesejahteraan dan

dinamikanya dipahami dalam konteks sosiokultural. Selain itu, The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang bermitra dengan para peneliti, baik indigenous maupun non-indigenous, telah menggeser cara berpikir mengenai bagaimana kesejahteraan seharusnya dipahami, diukur dan dipantau. Isu mengenai kesejahteraan akan lebih tepat apabila dipahami dengan menggunakan *indigenous wellbeing framework* sehingga mampu memotret kesejahteraan melalui cara pandang setempat, diukur dengan ukuran setempat, serta dimonitor sesuai dengan keadaan setempat (Prout, 2012). Dengan demikian penyusunan parameter kebijakan, penyediaan fasilitas, pembuatan keputusan, dan pengalokasian sumber daya dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan kontrak kesejahteraan yang dimaknainya (Walter, dalam Prout, 2012).

Karyani, dkk (2014) melalui pendekatan *grounded*, melakukan penelitian untuk memahami kesejahteraan dari cara pandang siswa. Subjek yang digunakan adalah 337 siswa SMP Muhammadiyah di Surakarta yang mewakili sekolah bagus, sedang, dan kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengaitkan kesejahteraan sebagai suatu suasana atau keadaan yang: aman/tenteram/damai (35,7%), kemudian tercapainya tujuan/keinginan hidup (19%) dan bahagia (19%), serta rukun/tanpa perdebatan/hubungan harmonis/tolong-menolong (16,7%). Sehat (2,4%) dan taat aturan (1,2%). Penelitian tersebut juga menemukan enam aspek yang menggambarkan pengalaman sejahtera pada siswa. Aspek yang paling banyak muncul dari dominan adalah aspek sosial (49%), kognitif (17,3%), emosi (13%), pribadi/personal (10,5%), fisik (6,5), sisanya adalah aspek spiritual (3,7%). Aspek-aspek kesejahteraan menurut siswa terangkum pada tabel 1.

Berdasarkan *indigenous wellbeing framework* sebagaimana dikemukakan oleh UNPFII, maka hasil temuan dalam penelitian Karyani, dkk (2014) dapat digunakan untuk menyusun alat ukur kesejahteraan pada siswa.

Penyusunan (konstruksi) instrumen pengukuran pada dasarnya merupakan proses kuantifikasi suatu atribut (Azwar, 2014). Instrumen yang baik harus mampu mengukur apa yang hendak diukur (memiliki validitas pengukuran tinggi) dan mampu membedakan subjek yang memiliki atribut yang diukur dan yang tidak memiliki atribut yang diukur. Hal itu membutuhkan serangkaian prosedur pelaksanaan dalam penyusunan instrumen. Azwar (2010) menyatakan bahwa penyusunan suatu instrumen pengukuran harus didahului oleh kejelasan atribut yang hendak diukur. Dalam konteks penelitian ini, atribut yang hendak diukur adalah kesejahteraan siswa. Penyusunan instrumen membutuhkan definisi yang jelas serta operasionalisasi aspek-aspek atribut ukur ke dalam indikator perilaku. Dalam penelitian ini digunakan untuk menyusun alat ukur adalah pemahaman mengenai pengertian dan aspek-aspek kesejahteraan yang ditemukan dalam konteks lokal sesuai dengan hasil penelitian Karyani, dkk (2014).

Azwar (2014) menjelaskan bahwa prosedur penyusunan instrumen pengukuran selanjutnya adalah menuangkan hasil operasionalisasi aspek atribut pengukuran dan indikator perilaku disertai aitem-aitem pernyataan ke dalam format tertentu yang disebut dengan *blue print* instrumen. Tahapan berikutnya adalah uji validitas isi instrumen yang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas aitem dalam membedakan individu. Di dalam tahapan ini, membutuhkan penilaian ahli sesuai bidang kajian yang diukur dan ahli pengukuran. Langkah berikutnya adalah uji coba instrumen pada subjek penelitian. Pada penelitian ini, berusaha menyusun instrumen

Tabel 1. Aspek Kesejahteraan Siswa

Aspek/Dimensi /Komponen	Pengertian	Contoh Pengalaman yang Membuat Siswa Sejahtera	Contoh Pengalaman yang Membuat Siswa Tidak Sejahtera
Sosial (49%)	Kesejahteraan yang berkaitan dengan adanya perasaan nyaman dalam relasi interpersonal dengan di lingkungan sekolah, baik teman, guru, maupun staf sekolah	Melakukan kegiatan positif bersama-sama teman, mudah bergaul, mempunyai banyak teman, bercanda dengan teman-teman, kumpul-kumpul bersama teman, membantu teman yang sedang kesulitan	Diolok-olok teman-teman, dijauhi teman-teman sekolah, bertengkar dengan teman, diremehkan teman
Kognitif (17%)	Kesejahteraan yang berkaitan dengan kepuasan kognitif, seperti memecahkan masalah dan berprestasi akademik	Mendapat nilai bagus, giat belajar, bisa mengerjakan tugas sulit dari guru	Tidak mampu menjawab soal ujian, guru memberi banyak tugas namun tidak dinilai
Emosi (13%)	Kesejahteraan yang berkaitan dengan emosi positif	Gembira, semangat, optimis	Tertekan karena banyak masalah, merasa putus asa, berkata kotor
Pribadi (10%)	Kesejahteraan dalam perkembangan/pertumbuhan pribadi ( <i>self</i> ) yang berhubungan dengan identitas, kemandirian, integritas pribadi	Diberi kebebasan untuk menentukan yang terbaik, merasa berharga/dihargai diakui kemampuannya	Dikekang orangtua, tidak dihargai, berbohong, tidak taat tata tertib sekolah
Fisik (7%)	Kesejahteraan yang berhubungan dengan perasaan tercukupinya keutuhan fisik terutama kesehatan dan material seperti misalnya: kecukupan materi, kesehatan, keamanan lingkungan rumah dan sekolah, kenyamanan lingkungan sekolah	Terpenuhinya kebutuhan sekolah, mempunyai uang saku	Terlambat membayar uang sekolah, sakit-sakitan, kelas gaduh dan berisik
Spiritual (4%)	Kesejahteraan yang berkaitan dengan semangat untuk berhubungan dan mendekatkan diri kepada Tuhan	Menjalankan ibadah secara rutin (misalnya shalat, berdoa)	-

pengukuran kesejahteraan dengan pendekatan *indigenous well-being framework* dengan menerapkan prinsip-prinsip psikometri.

Pertanyaannya adalah: bagaimana *instrument blueprint* yang dibangun? Bagaimana kemampuan aitem-aitem yang disusun untuk mengukur atribut yang hendak diukur? Bagaimana kemampuan masing-masing aitem dalam membedakan individu yang memiliki atribut yang diukur

dan individu yang tidak memiliki atribut yang diukur?

### 3. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode psikometrik yang merupakan prosedur penyusunan instrumen pengukuran atribut psikologis yang valid dengan menggunakan statistik.

**Partisipan.** Partisipan penelitian ini adalah siswa dari dua SMP di Kota

Surakarta, kelas VII – VIII, berjumlah 398 siswa. Mereka terdiri dari 210 siswa laki-laki, dan 188 siswa perempuan, berusia antara 12 – 16 tahun. Para siswa direkrut untuk berpartisipasi dalam penelitian ini secara sukarela. Partisipasi siswa dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk mengisi skala yang disusun peneliti.

**Prosedur.** Prosedur penyusunan instrumen terdiri dari 5 langkah. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

*Langkah 1.* Menyusun *blueprint* instrumen berdasarkan aspek-aspek yang ditemukan pada penelitian Karyani, dkk (2014). *Blueprint* alat ukur kesejahteraan siswa menggambarkan aspek kesejahteraan siswa, indikator, dan aitem. Aitem disusun dalam bentuk skala perilaku. Skala bergerak dari 1 – 5 (kode A – E) yang menunjukkan seberapa sering siswa melakukan hal-hal yang ditunjukkan dalam setiap aitem. Angka 1 (sering sekali), 2 (sering), 3 (kadang-kadang), 4 (jarang), dan 5 (tidak pernah)

*Langkah 2.* Melakukan validasi isi instrumen untuk mengetahui apakah aitem yang disusun. Validasi dilakukan melalui proses *expert judgement* yang melibatkan 11 ahli psikologi berpendidikan doktor atau sedang menempuh pendidikan doktor bidang psikologi, serta ahli psikometri. Hasil penilaian oleh ahli dianalisis dengan menggunakan formula Aiken untuk menemukan koefisien validitas isi. Dengan 11 penilai, maka menurut Aiken (1985) aitem dikatakan memiliki validitas yang baik bila koefisien  $V < 0,70$  ( $p < 0,05$ ).

*Langkah 3.* Melakukan uji coba secara empiris terhadap skala yang telah disusun pada langkah 2. Format pen-skala-an menggunakan model Likert. Ujicoba dilakukan pada partisipan (398 siswa). Skala

yang telah diisi siswa diberi skor. Untuk aitem *favourable* diberi skor 5, sedangkan yang *unfavourable* diberi skor 1.

*Langkah 4.* Melakukan uji daya beda aitem secara statistik. Tujuannya untuk melihat kemampuan setiap aitem dalam membedakan individu ke dalam berbagai tingkatan kualitatif atribut yang diukur berdasarkan skor kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan mengorelasikan distribusi skor aitem dengan distribusi skor total. Teknik yang digunakan *product moment* dari Pearson. Suatu aitem dikatakan memiliki daya beda yang baik apabila koefisien korelasinya ( $r_{ix}$ )  $\geq 0,30$  (Azwar, 2014). Untuk memudahkan proses penghitungan uji daya beda aitem digunakan SPSS seri 19.

*Langkah 5.* Melakukan kompilasi akhir. Hal ini ditempuh dengan cara membandingkan koefisien validitas isi Aiken dengan koefisien daya beda aitem. Aitem yang terpilih adalah aitem yang memiliki koefisien validitas isi Aiken tinggi/cukup tinggi sekaligus memiliki koefisien daya beda aitem tinggi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Blue print instrumen.** Instrumen pengukur kesejahteraan siswa dalam penelitian ini terdiri 39 item yang tersusun dalam 6 aspek yakni sosial, kognitif, emosi, pribadi/personal sebanyak, fisik, dan spiritual. Aspek sosial terdiri dari 3 indikator, kognitif 2 indikator, emosi 2 indikator, personal 2 indikator, fisik-materi 3 indikator, dan sipiritual 1 indikator. Masing-masing indikator dibuat aitem, yakni *favourable* (F) artinya mendukung atribut yang diukur, dan *unfavourable* (UF) tidak mendukung atribut yang diukur.

Tabel 2. *Blue print* Instrumen Pengukur Kesejahteraan Siswa

Aspek	Indikator Perilaku	No. Aitem	Koefisien	
			Validitas Isi	Daya Beda
Sosial	Merasa nyaman dalam menjalin relasi sosial dengan teman	1 (F)*	Tinggi	Tinggi
		2 (F)	Tinggi	Rendah
		3 (F)*	Tinggi	Tinggi
		4 (F)	Tinggi	Rendah
		5 (F)	Tinggi	Rendah
		6 (F)*	Tinggi	Tinggi
		7 (UF)*	Tinggi	Tinggi
		8 (UF)*	Tinggi	Tinggi
		9 (UF)*	Tinggi	Tinggi
		10 (UF)*	Tinggi	Tinggi
	Merasa nyaman menjalin relasi sosial dengan guru dan staf sekolah	11 (F)	Tinggi	Rendah
		12 (F)	Tinggi	Rendah
		13 (UF)*	Tinggi	Tinggi
		14 (UF)	Tinggi	Rendah
Merasa nyaman dalam menjalin relasi dengan orangtua dan anggota keluarga	15 (F)	Rendah	Gugur	
	16 (UF)	Tinggi	Rendah	
Kognitif	Senang memecahkan masalah	17 (F) *	Tinggi	Tinggi
		18 (F)	Tinggi	Rendah
		19 (UF)*	Tinggi	Tinggi
	Bangga dengan prestasi akademik	20 (F)	Tinggi	Rendah
		21(UF)*	Tinggi	Tinggi
Emosi	Merasa bahagia	22 (F)*	Tinggi	Tinggi
		23(UF)*	Tinggi	Tinggi
	Tidak mudah kecewa/tertekan bila menghadapi masalah	24 (F)	Tinggi	Rendah
		25(UF)*	Tinggi	Tinggi
Pribadi	Perasaan positif terhadap diri pribadi	26(F)	Tinggi	Rendah
		27(UF)*	Tinggi	Tinggi
	Memiliki kemandirian dalam menentukan pendapat	28(F)	Tinggi	Rendah
		29(UF)	Tinggi	Rendah
		30(UF)	Tinggi	Rendah
	Memiliki integritas pribadi	31(UF)*	Tinggi	Tinggi
32(UF)*		Tinggi	Tinggi	
Fisik - Materi	Perasaan tercukupi secara materi	33 (F)	Tinggi	Tinggi
		34 (UF)	Tinggi	Rendah
	Sehat	35 (UF)*	Tinggi	Cukup
		36 (UF)	Tinggi	Rendah
		37 (UF)	Tinggi	Rendah
Spiritual	Menjalalakan ibadah	38 (F)*	Tinggi	Tinggi
		39 (UF)*	Tinggi	Tinggi

Keterangan: \* aitem dalam Skala Kesejahteraan Siswa yang memenuhi syarat sebagai aitem yang baik (memiliki validitas isi tinggi dan daya beda tinggi)

**Koefisien validitas isi.** Validitas ini menunjukkan kemampuan aitem-aitem untuk mengukur atribut yang hendak diukur Hasil penilaian ahli menunjukkan bahwa koefisien validitas Aiken bergerak dari 0,66 – 0,91 ( $p < 0,05$ ). Ada satu aitem yang digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu memiliki koefisien  $\leq 0,70$  Dengan demikian terdapat 38 aitem yang memenuhi kriteria

sebagai aitem yang memiliki validitas isi yang baik.

**Koefisien daya beda aitem.** Kemampuan aitem dalam membedakan individu yang memiliki atribut yang diukur dan yang tidak memiliki atribut yang diukur atau membedakan individu ke dalam berbagai tingkatan kualitatif atribut yang diukur berdasarkan skor kuantitatif, ditunjukkan oleh besaran koefisien. Suatu aitem

dikatakan memiliki daya beda yang baik/tinggi apabila korelasi skor aitem terhadap total skor skala sama dengan atau lebih dari 0,30 ( $r_{ix} \geq 0,30$ ). Bila ( $r_{ix} \geq 0,25$ ) masih dapat dipertimbangkan (daya beda sedang/cukup), namun bila  $r_{ix} \leq 0,20$  maka aitem tersebut memiliki daya beda rendah (Azwar, 2014). Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 38 aitem yang diujikan secara empirik kepada siswa, terdapat 19 aitem yang memiliki daya beda tinggi ( $r_{ix} \geq 0,30$ ), 1 aitem sedang ( $r_{ix} \geq 0,25$ ), dan 17 aitem rendah ( $r_{ix} \leq 0,20$ ).

Rangkuman *blue print*, validitas, dan daya beda aitem terdapat pada tabel 2.

**Pembahasan.** Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari 39 aitem yang disusun memiliki koefisien validitas yang bergerak dari 0,66 sampai dengan 0,91. Aitem yang memiliki koefisien paling rendah yakni aitem yang mengukur aspek kesejahteraan sosial siswa (“perasaan nyaman dalam menjalin relasi dengan orang tua dan anggota keluarga”). Oleh 11 ahli dinilai kurang sesuai untuk mewakili indikator yang diukur. Koefisien validitas aitem tersebut sebesar 0,66 ( $p \leq 0,05$ ) sementara *cutting point* untuk dikategorikan valid harus memiliki koefisien  $\geq 0,70$  ( $p \leq 0,05$ , untuk 11 penilai). Secara kualitatif aitem tersebut dianggap oleh para penilai mengandung *social desirability* yang cukup tinggi sehingga cenderung akan mengarahkan jawaban positif dari siswa. Sementara itu, terdapat tiga aitem yang memiliki koefisien validitas terbesar, yakni aitem nomor 9,23,34. Masing-masing koefisien validitasnya 0,91. Aitem nomor 9 mengukur aspek sosial, yang *unfavourable* (“bertengkar dengan teman”), aitem nomor 23 mengukur aspek emosi yang *unfavourable* (“sedih karena banyak kekurangan”), dan aspek nomor 34 yang mengukur fisik-materi yang *unfavourable* (“terlambat membayar uang sekolah”). Hasil analisis koefisien daya beda aitem menunjukkan terdapat 20 aitem yang memiliki daya beda tinggi 1 aitem sedang, dan 17 aitem rendah. Hal ini menunjukkan bahwa, suatu aitem yang oleh para ahli dinilai telah mencerminkan indikator dan aspek pengukurannya, namun

belum tentu secara empiris memiliki daya beda yang tinggi. Aitem yang memiliki validitas isi tinggi namun daya beda rendah adalah aitem yang mengungkap aspek sosial (20%), kognitif (5 %), emosi (2,6%), pribadi (10,3%), fisik/materi (10,3%), spiritual (0%).

## 5. SIMPULAN

Skala Kesejahteraan Siswa yang dihasilkan melalui metode psikometri pada penelitian ini terdiri dari 6 aspek yang tersusun dalam 20 aitem, dengan rincian. 19 aitem memiliki koefisien validitas tinggi dan koefisien daya beda tinggi, dan 1 aitem memiliki koefisien validitas tinggi dan koefisien daya beda cukup/sedang. Kedua puluh aitem yang dihasilkan telah mewakili semua aspek yang diukur.

Skala Kesejahteraan Siswa yang dihasilkan pada penelitian ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan alat ukur sesuai dengan konteks siswa. Konstrak kesejahteraan yang digunakan dibangun dari siswa SMP Muhammadiyah di Surakarta, sehingga untuk populasi tersebut skala ini dapat digunakan. Agar dapat digunakan secara lebih luas, maka penelitian replikasi disarankan untuk dilakukan, misalnya pada siswa SMP negeri, SMP swasta lain, maupun untuk SMA/SMK di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk populasi siswa SD/TK skala ini kurang disarankan untuk digunakan mengingat konstruksi alat ukur pada populasi anak yang lebih kecil perlu metode yang berbeda dari metode yang digunakan dalam penelitian ini.

## 6. UCAPAN TERIMAKASIH

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Surakarta
- Kepala Sekolah, Guru, dan siswa SMP Muhammadiyah 1, 5, 10, 7 Surakarta
- Mahasiswa tim PUPS Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Para *expert judgement*

## 7. REFERENSI

- Aiken, L.R. (1985). Tree coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement*, 45, 131-142.
- Azwar, S. (2014). *Penyusunan Skala Psikologi*, edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Camfield, L., Crivello, G., & Woodhead, M. (2009). Wellbeing Research in Developing Countries: Reviewing the Role of Qualitative Methods. *Social Indicator Research*, 90, 5–31.
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diener, E. (2000). Subjective wellbeing: the science of happiness and a proposal for national index. *American Psychologist*, 55 (1), 34-43.
- Diener, E. (ed.) (2009a), *Assessing Well-Being: The Collected Works of Ed Diener*, Social Indicators Research Series 39, Dordrecht, Springer.
- Dodge, R., Daly, A., Huyton, J., & Sanders, L. (2012). The challenge of defining wellbeing. *International Journal of Wellbeing*, 2 (3), 222-235.
- Ereaut, G., & Whiting, R. (2008). What do we mean by well-being? And why might it matter?. Research Report DCSF-RW073, Linguistic Landscape, Department of Children, Schools & Families, UK. Diunduh 3 April 2013 dari: <http://dera.ioe.ac.uk/8572/1/dcsf-rw073%20v2.pdf>.
- Frailon, J. (2004). Measuring student well-being in context of Australian Schooling: Discussion Paper. Diunduh pada tanggal 12 Januari 2012 dari [http://www.curriculum.edu.au/verve/\\_resources/Measuring\\_Student\\_Well-Being\\_in\\_the\\_Context\\_of\\_Australian\\_Schooling.pdf](http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/Measuring_Student_Well-Being_in_the_Context_of_Australian_Schooling.pdf).
- Fraine, R.D., Landeghem, G.V., Damme, J.V., & Onghena, P. (2005). An analysis of well-being in secondary school with multilevel growth curve models and multilevel multivariate models. *Quality & Quantity* 39: 297 – 316.
- Henderson, W.W.L., & Knight, T. (2012). Integrating the hedonic and eudaemonic perspective to more comprehensively understand wellbeing and pathways wellbeing. *International Journal of Wellbeing*, 2 (3). 196-221..
- Hertinjung, W.S., & Karyani, U. (2012). *Bullying di sekolah dasar*. Laporan Penelitian. LPPM UMS.
- Huebner, E.S., Suldo, S.M., & Valois, R.F. (2003). Psychometric Properties of Two Brief Measures of Children's Life Satisfaction: The Students' Life Satisfaction Scale and the Brief Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale. Paper prepare for the Indicators of Positive Development Conference, March 12 – 13, 2003. Diunduh dari [www.childrens.org/files/huenbersuldovaloispaper.pdf](http://www.childrens.org/files/huenbersuldovaloispaper.pdf).
- Karyani, U., Prihartanti, N., Prastiti, W.D., Lestari, R., Hertinjung, W.S., Prasetyaningrum, J., Yuwono, S., & Partini. (2014). Wellbeing on child's perspectives. Paper presented on The 5<sup>th</sup> Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology, January, 10 – 11 at Sebelas Maret University of Surakarta.
- Konu, A., & Rimpela, M. (2002). Well-being in school: a conceptual model. *Health Promotion International*, Vo. 17 (1), 79 – 89
- Petegem, K.V., Aelterman, A., Keer, H.V., & Rosseel, Y. (2008). The influence of student characteristics and interpersonal teacher behaviour in the classroom on student's wellbeing. *Social Indicators Resesearch*, 85, 279–291.
- Pollard, E.L., & Lee, P.D (2003). Child Well-being: A systematic review on the literatur, *Social Indicators Research*, 61(1), 59-78.

- Prout, S. (2012). Indigenous wellbeing frameworks in Australia and the Quest for Quantification. *Social Indicators Research*, 109, 317-338.
- Rees, G., Goswami, H. & Bradshaw, J. (2010). Developing an index of children's subjective well being in England. Diunduh pada 12 Maret 2013 dari [http://www:childrensociety.org.uk](http://www.childrensociety.org.uk).
- Risdaskes. (2013). Riset dasar kesehatan 2013. Diunduh dari: <http://depkes.go.id/downloads/riskedas2013/Hasil%20Riskedas%202013.pdf>.
- Ryff, C.D.(1989). Happiness is everything or is it? Exploration on the meaning of psychological wellbeing. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57 (6), 1069-1081.
- Samman, E. (2007). Psychological & Subjective Well-being: A proposal for internationally comparable indicators. Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), Department of International Development, Queen Elizabeth House, University of Oxford. Diunduh dari <http://www.ophi.org.UK>
- South Australia Department of Education and Children's Service. (2005). Wellbeing is central to learning. Working paper. Dinduh pada 14 Mei 2012 dari <http://www.decd.sa.gov.au/learnerwellbeing>
- Statham, J., & Chase, E. (2010). Childhood wellbeing: a brief overview. Briefing Paper 1, Agustus. Childhood wellbeing research centre. London. Diunduh pada tanggal 11 Januari 2012 dari [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/183197/Child-Wellbeing-Brief](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183197/Child-Wellbeing-Brief).
- Taylor, D. (2011), 'Wellbeing and welfare: a psychosocial analysis of being well and doing well enough. *Journal of Social Policy*, 40: 4, 777-94.
- Thomson, S., & Aked, J. (2009). A guid to measuring children's wellbeing. New Economic Fundation dan Action For Children. Diunduh dari <http://neweconomic.org/>.
- UNICEF. (2012). The Structural Determinants of Child Wellbeing. Research Paper. Diunduh dari pada 26 Oktober 2014 dari [http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/structural\\_determin\\_eng.pdf](http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/structural_determin_eng.pdf).
- Victorian Government. (2010). The Effectiveness of Student Wellbeing Programs and Services. Februari 2010. Victorian Auditor- General's Report. Diunduh pada tanggal 20 januari 2013 dari <http://www.audit.vic.gov.au/publications/2009-10/290110-Student-Wellbeing-Full-Report.pdf>
- World Health Organization (2001). Mental health: new understanding, new hope. Geneva: World Health Organization; 2001. Diunduh dari: <http://www.who.int/whr/2001/en/index.html>

## ANALISIS NILAI PERUSAHAAN DITINJAU DARI *BOARD GOVERNANCE*

Yunus Harjito<sup>1)</sup>, Rosyid Nur Anggara Putra<sup>2)</sup>, Djoko Suhardjanto<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[yunus.better@gmail.com](mailto:yunus.better@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta  
[rosyidky@yahoo.com](mailto:rosyidky@yahoo.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta  
[djoko.suhardjanto@yahoo.com](mailto:djoko.suhardjanto@yahoo.com)

### Abstract

*This study aim to examine the effect of board governance and firm value. This research is conducted at the LQ45 company's on the Indonesia Stock Exchange from 2008-2012 with a sample of 80 companies and using multiple linear regression method. Board Governance is proxied by Board of Commissioners size, proportion of independent Commissioners, Number of Commissioners Meetings, Audit Committee Size, and number of Audit Committee meetings, while the firm value is measured by Tobin's Q ratio. The results show that proportion of independent commissioner, Audit Committee size, and number of Audit Committee meetings have a significant impact on firm value, while the size of the Board of Commissioners size and Number of Commissioners Meetings has not impact on firm value.*

**Keywords:** board governance, firm value

### 1. PENDAHULUAN

Penerapan *corporate governance* menjadi agenda penting sejak krisis keuangan global yang terjadi di Asia dan Amerika Latin. Krisis keuangan global tersebut merupakan akibat dari tata kelola perusahaan yang buruk (*poor corporate governance*) dan belum adanya disiplin ilmu dalam tata kelola perusahaan (OECD, 2001). Faktor pendorong penerapan *corporate governance* yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (FCGI, 2001).

Penerapan *corporate governance* dilakukan guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, untuk mengantisipasi krisis dan mencegah korupsi di level perusahaan. Perkembangan penerapan *corporate governance* di Indonesia dimulai ketika krisis keuangan pada pertengahan tahun 1990an. Upaya untuk memperbaiki *Corporate Governance* pertama kali dikeluarkan pada tahun 1999 oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG).

*Corporate governance* merupakan perluasan konsep yang mengatur hubungan antara pemilik dengan manajemen perusahaan. Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan memungkinkan timbulnya *agency problems*, yaitu kondisi dimana pengelola perusahaan (manajer) tidak bekerja secara optimal dalam rangka memaksimalkan kekayaan pemilik. Menurut Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *agency problems* disebabkan terjadinya sistem pengambilan keputusan yang terpisah antara manajemen dan pihak pengawas dari keputusan-keputusan penting pada seluruh tingkatan organisasi.

*Agency problems* mengakibatkan adanya sifat *opportunistic* manajemen yang mengakibatkan rendahnya kualitas laba. Rendahnya kualitas laba berdampak pada investor dan kreditor dalam membuat keputusan sehingga nilai perusahaan akan berkurang (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Morck *et al.* (1988) menemukan bukti bahwa Tobin's Q (nilai perusahaan) meningkat dan kemudian menurun searah dengan peningkatan kepemilikan manajerial.

Fama (1978) menjelaskan bahwa nilai perusahaan tercermin pada harga pasar sahamnya, semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi nilai perusahaan. Penilaian harga saham digunakan untuk membandingkan nilai perolehan saham dengan harga pasar saham dan untuk memutuskan apakah akan menjual, membeli atau menahan saham (Fernandez, 2013).

Penelitian terdahulu mengenai nilai perusahaan atas penerapan *corporate governance* sudah banyak dilakukan. Bai, Liu, Lu, Song, dan Zhang (2002) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan salah satu faktor pendukung yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan di China. Hal serupa diungkapkan oleh Brown dan Caylor (2006), Bauwhede (2009), Belkhir (2009), bahwa komponen *governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan di Indonesia telah banyak dilakukan antara lain: Sialagan dan Machfoedz (2006), Wahyudi dan Pawestri (2006), dan Herawati (2008). Penelitian Wahyudi dan Pawestri (2006) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik secara langsung maupun melalui keputusan pendanaan. Herawaty (2008) membuktikan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah variabel *corporate governance*, ukuran perusahaan dan *earnings management*. Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* dengan variabel komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Perbedaan hasil studi

tersebut disebabkan oleh perbedaan variabel *corporate governance* yang digunakan dalam setiap penelitian, perbedaan peraturan, dan kondisi perekonomian pada masing-masing negara tempat penelitian. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengisyaratkan perlunya penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan, khususnya di Indonesia.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### a. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori tentang hubungan kontraktual *principal* dengan *agent* yang membuat sebuah model mengenai suatu hubungan kontraktual antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Teori tersebut dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). *Principal* atau pemilik yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaan kepada *agent*/manajer sesuai dengan kontrak kerja. Dengan kontrak tersebut, maka pemisahan tanggung jawab antara *principal* dan *agent* menjadi jelas.

Pihak manajemen sebagai *agent* bertanggung jawab secara moral dan profesional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Hubungan kontraktual tersebut antara manajer sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik (*principal*). Informasi yang diberikan oleh manajer/agen kepada pemilik terkadang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya, sehingga menimbulkan suatu konflik kepentingan atau konflik keagenan (*agency conflict*) (Jensen dan Meckling, 1976).

### b. Corporate Governance

*Corporate governance* muncul sebagai solusi atas keterbatasan teori keagenan. *Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka menerima *return* atas dana yang mereka investasikan (Herawaty, 2008).

Fungsi *Corporate Governance* bertujuan untuk menyelesaikan kesenjangan yang

terjadi pada kontrak keagenan dengan cara yang konsisten untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Macey dan O'Hara, 2003). Lebih lanjut Macey dan O'Hara (2003) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah kontrak implisit antara pemegang saham dengan manajer dan direksi untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham.

#### c. **Board Governance**

OECD (2004) mengungkapkan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. UU No. 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Berkenaan dengan bentuk *board governance* dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Anglo Saxon dan dari Kontinental Eropa (FCGI 2001). Sistem Hukum Anglo Saxon mempunyai Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*. Pada sistem Anglo Saxon perusahaan hanya mempunyai satu Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Negara-negara dengan *One Tier System* misalnya Amerika Serikat dan Inggris.

#### d. **Kaitan Board Governance dan Nilai Perusahaan**

Nilai perusahaan menurut Fama (1978) tercermin pada harga pasar sahamnya, semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi nilai perusahaan sehingga kesejahteraan pemiliknya meningkat. Nilai

perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. *Board governance* dapat dicerminkan dalam nilai perusahaan yang dilihat dari harga saham.

Abdallah *et al.* (2012) menyatakan bahwa *board governance* yang diproksikan dengan proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut juga didukung oleh beberapa peneliti yang lain (Babatunde dan Olaniran, 2009; Belkhir, 2009; Ehikioya, 2007; dan Ntim dan Osei, 2011)

#### e. **Pengembangan Hipotesis**

Yermack (1996) menemukan bukti bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan di Amerika Serikat. Hal ini berarti bahwa semakin besar anggota dewan komisaris menurunkan nilai perusahaan. Pengaruh negatif tersebut disebabkan bahwa ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar tidak efektif dalam melakukan komunikasi dan koordinasi, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

Eisenberg *et al.* (1998) menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin besar ukuran Dewan Komisaris maka perusahaan mengalami masalah koordinasi dan komunikasi, sehingga dalam proses pengambilan keputusan menjadi tidak efektif dan nilai perusahaan menjadi turun.

Dewan Komisaris dengan anggota besar bekerja kurang efektif dibandingkan dengan Dewan Komisaris dengan anggota kecil, hal tersebut disebabkan Dewan Komisaris dengan anggota yang besar mengalami kesulitan dalam berkoordinasi, fleksibilitas, dan komunikasi (De Andres, Azofra dan Lopez 2005). Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan sesuai dengan penelitian Yermack (1996); Eisenberg *et al.* (1998); Ahmed, Hosain, dan Adams, (2006); Ehikioya (2007), Kumar dan Sigh (2013).

H<sub>1</sub>: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Bhagat dan Bolton 2007 membuktikan bahwa proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal itu disebabkan proporsi komisaris independen yang kecil lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen sehingga nilai perusahaan menjadi lebih tinggi.

Hasil penelitian Belkhir (2009) menyatakan bahwa proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan di Amerika Serikat. Pengaruh negatif tersebut disebabkan dalam proporsi Komisaris Independen yang besar, koordinasi dan komunikasi tidak berjalan efektif sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pengawasan yang berdampak pada turunnya nilai perusahaan.

Proporsi Komisaris Independen yang rendah menghasilkan pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen perusahaan, hal itu disebabkan fungsi Komisaris Independen sebagai pengawas akan lebih bermanfaat untuk meningkatkan nilai perusahaan (Bhagat dan Bolton, 2007). Oleh karena itu proporsi Komisaris Independen yang lebih kecil lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Penelitian dengan hasil yang menyatakan proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Bhagat dan Bolton (2007); Belkhir (2009); Koerniadi dan Rad (2012); Oor, Emanuel, dan Wong (2005); Dah, Abosedra, dan Matar (2012).

H<sub>2</sub>: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris yang lebih banyak meningkatkan nilai perusahaan (Vafeas 1999). Peningkatan nilai perusahaan tersebut disebabkan oleh meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengambilan keputusan sehingga Dewan Komisaris lebih cepat dalam memberikan masukan terhadap masalah yang terjadi di perusahaan.

Ntim dan Osei (2011) meneliti pengaruh rapat Dewan Komisaris terhadap nilai perusahaan dengan sampel dari 169 perusahaan yang terdaftar 2002-2007 di Afrika Selatan. Hasil penelitian

menunjukkan rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Rapat Dewan Komisaris tersebut meningkatkan efektifitas dalam memberikan saran dan pengawasan terhadap kedisiplinan manajemen, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Frekuensi rapat pemegang saham dan rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena dalam rapat tersebut Dewan Komisaris mendapatkan informasi penting dan menjalankan tugasnya dalam pengawasan (Francis, Hasan, dan Wu 2012).

Dewan Komisaris dengan frekuensi rapat yang lebih tinggi meningkatkan efektifitas dalam memberikan saran dan pengawasan terhadap kedisiplinan manajemen, sehingga meningkatkan nilai perusahaan (Ntim dan Osei, 2011; Isshaq, Bokpin, dan Onumah, 2009; Tong, Junarsin, dan Davidson, 2013).

H<sub>3</sub>: Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Ojulari (2012) menemukan hasil bahwa ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Ojulari tersebut dilakukan dengan menggunakan sampel 100 perusahaan di Bursa Efek London tahun 2008 dan 2009. Pengaruh positif tersebut disebabkan oleh efektivitas ukuran komite audit dalam melakukan pengendalian internal, sehingga kepatuhan manajemen terhadap peraturan lebih baik.

Hasil penelitian Siallagan dan Mahfoedz (2006) menyatakan bahwa ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil positif tersebut disebabkan fungsi Komite Audit sebagai pengendali internal telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal juga diharapkan dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba.

Ukuran Komite Audit berperan dalam meningkatkan *corporate governance*, semakin besar jumlah komite audit semakin efektif pengendalian internal perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai

perusahaan (DeFond, *et al.*, 2004; Mollah, Farouque, dan Karim, 2012).

H<sub>4</sub>: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Jumlah rapat komite audit penting untuk efektifitas monitoring manajemen perusahaan (Lin *et al.*, 2006). Al Matari *et al.* (2007) menemukan bukti bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif tersebut disebabkan efektifitas rapat komite audit dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan, sehingga meningkatkan kedisiplinan manajemen.

Beasley *et al.* (2000) menemukan bukti bahwa Komite Audit dengan rapat yang lebih tinggi memiliki lebih banyak waktu untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, mengidentifikasi risiko manajemen dan memantau pengendalian internal sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian Brick dan Chidambaram (2007) mengungkapkan bahwa rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Fungsi rapat Komite Audit merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dan pengambilan keputusan.

Rapat Komite Audit meningkatkan monitoring terhadap perusahaan, sehingga nilai perusahaan meningkat (Hsu, 2007). Bouaziz (2012) menemukan bukti jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif tersebut disebabkan rapat Komite Audit lebih menitikberatkan pada pencegahan *fraud* sehingga segala bentuk kecurangan dapat segera dicegah dan berdampak pada meningkatnya kepercayaan pemegang saham.

Berdasarkan uraian ini, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

### 3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya masuk dalam indeks LQ 45 yang terdiri dari 45 perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi dan tingkat kapitalisasi pasar yang besar periode 2008-2012. Pemilihan tahun

penelitian didasarkan atas krisis tahun 2008 terjadi inflasi yang tinggi pada pertengahan tahun tersebut, dan mengalami penurunan inflasi pada akhir tahun 2008 (<http://www.setneg.go.id>, 2009).

Total observasi yaitu 225 perusahaan. Namun, tidak semua populasi menjadi obyek penelitian, sehingga perlu pengambilan sampel. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan data *annual report* perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45. Data diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan *annual report* yang didapat melalui website masing-masing perusahaan sampel.

#### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. **Nilai Perusahaan**, diukur dengan rasio Tobin's Q yang dimodifikasi dan disederhanakan oleh Chung & Pruitt (1994) terhadap rumus yang dibuat oleh Lindenberg & Ross (1981) adalah sebagai berikut :

$$\text{Tobins' Q} = \frac{\text{Total Market Value of Firm (MVS + D)}}{\text{Total Asset (TA)}}$$

Keterangan :

MVS = *Market value of all outstanding shares, i.e. the firm's Stock Price\* Outstanding Shares.*

D = *Total Debt*

TA = *Firm's Assets*

b. **Ukuran Dewan Komisaris**, merupakan jumlah anggota dewan komisaris pada sebuah perusahaan (Belkhir, 2009; De Andres *et al.*, 2005; Yermack, 1996; Eisenberg *et al.*, 1998; Ahmed *et al.*, 2006; Ehikioya, 2007; Suhardjanto *et al.*, 2012; Kumar dan Singh, 2013).

Ukuran Dewan Komisaris =  $\sum$  Komisaris Perusahaan +  $\sum$  Komisaris Independen

c. **Proporsi Komisaris Independen**, diukur dengan persentase anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan sesuai dengan penelitian Suhardjanto dan Afni

(2009) dan Belkhir (2009) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

- d. **Rapat Dewan Komisaris**, merupakan pertemuan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan (Ntim dan Osei, 2011; Isshaq *et al.*, 2009; Tong *et al.*, 2013; Francis *et al.*, 2012). Rapat Dewan Komisaris yang digunakan adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam satu tahun (Ntim dan Osei, 2011; Brick dan Chidambaran, 2007; dan Cety dan Suhardjanto, 2010).
- e. **Komite Audit**, adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya (DeFond *et al.*, 2004; Siallagan dan Machfoedz, 2006; Mollah *et al.*, 2012; Ojulari, 2012; Al-Matari *et al.*, 2012). Ukuran Komite Audit diukur dengan jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006; Mollah *et al.*, 2012; dan Ojulari, 2012).
- f. **Rapat Komite Audit**, adalah rapat yang dilakukan oleh komite audit selama satu tahun (Lin *et al.*, 2006; Hsu, 2007; Al Matari *et al.*, 2007; Brick dan Chidambaran, 2007; Beasley *et al.*, 2000; Bouaziz, 2012). Rapat Komite Audit diukur dari jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun (Li *et al.*, 2008; Ettredge *et al.*, 2010; dan Suhardjanto *et al.*, 2012).

**Metode Analisis Data**

**a. Uji Regresi Berganda**

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji regresi berganda. Uji regresi berganda menguji hubungan dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Terdapat beberapa langkah pengujian regresi berganda yaitu : Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas,

Uji Autokorelasi), dan Model Regresi yaitu:

$$\text{Tobin's Q} = \beta_0 + \beta_1 \text{UDK} + \beta_2 \text{PKI} + \beta_3 \text{RDK} + \beta_4 \text{UKA} + \beta_5 \text{RKA} + \varepsilon$$

Keterangan :

Tobin's Q: Nilai Perusahaan

UDK : Ukuran Dewan Komisaris

PKI : Proporsi Komisaris Independen

RDK : Jumlah Rapat Dewan Komisaris

UKA : Ukuran Komite Audit

RKA : Jumlah Rapat Komite Audit

B<sub>0</sub> : Konstanta

β<sub>1</sub> - β<sub>5</sub> : Koefisien Regres

ε : *error term*

**b. Uji Hipotesis**

Dalam pengujian hipotesis langkah-langkah yang digunakan adalah dengan melakukan ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual yang disebut *goodness of fit* {Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>), Uji Signifikansi Menyeluruh atau Simultan (Uji F), Uji Signifikansi Individu atau Parsial (Uji Signifikansi t)}.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 pada Bursa Efek

Tabel 1

Hasil Pengumpulan Sampel	
Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan LQ45 tahun 2008-2012 (45 x 5)	225
Perusahaan yang selalu masuk LQ45 tahun 2008-2012 (16 x 5)	80
Perusahaan yang menerbitkan <i>annual report</i> secara utuh serta menyajikan informasi mengenai dewan komisaris dan komite audit secara lengkap	80
Jumlah sampel akhir	80

Sumber : [www.idx.com](http://www.idx.com)

Indonesia selama periode 2008 sampai dengan 2012.

**a. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi linier berganda.

## b. Pengujian Hipotesis

Hasil Regresi Berganda-Enter Method

Variabel	Notasi	Coeffisient	t-Statistik	Sig
Constant		5,051	5,505	0,000
Ukuran Dewan Komisaris	UDK	-0,005	-0,062	0,951
Proporsi Komisaris Independen	PKI	-5,815	-3,658	0,000
Rapat Dewan Komisaris	JRK	0,012	0,960	0,340
Ukuran Komite Audit	UKA	-0,217	-2,060	0,043
Rapat Komite Audit	RKA	0,028	2,057	0,043
<i>R Square</i>		0,271		
<i>Adjusted R Square</i>		0,221		
<i>F</i>		5,495		
<i>Sig</i>		0,000		

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,221 atau 22,1%. Hasil tersebut menunjukkan 22,1% perubahan nilai perusahaan dipengaruhi oleh ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan jumlah rapat Komite Audit, sedangkan 77,9% yang lain dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Nilai *F* sebesar 5,495 dengan nilai *sig* sebesar 0,00 lebih kecil daripada nilai signifikansi sebesar 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (*fit*) digunakan sebagai model pengujian hipotesis. Nilai signifikansi *F* menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan jumlah rapat Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dari lima variabel yang diuji terdapat tiga variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel independen yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut memiliki nilai *sig* kurang dari 0,05 yang terdiri dari proporsi Komisaris Independen dengan nilai *sig* 0,000, ukuran Komite Audit dengan nilai *sig* 0,43, dan jumlah rapat Komite Audit dengan nilai *sig* 0,43.

Tanda koefisien regresi untuk ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen dan ukuran Komite Audit adalah negatif, sedangkan jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah rapat Komite Audit positif. Koefisien regresi proporsi Komisaris Independen dan ukuran Komite Audit

mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi Komisaris Independen dan ukuran Komite Audit akan menurunkan nilai perusahaan. Koefisien regresi jumlah rapat komite audit positif mengindikasikan semakin banyak jumlah rapat komite audit semakin tinggi nilai perusahaan.

Dua variabel independen lain yaitu ukuran Dewan Komisaris dan jumlah rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *sig* lebih besar dari 0,05. Berdasar hasil uji t di atas maka model penelitian dapat dirumuskan :

$$\text{Tobin's } Q = 5,01 - 0,006 \text{ UDK} - 0,439 \text{ PKI} \\ + 0,127 \text{ JRK} - 0,217 \text{ UKA} + \\ 0,235 \text{ RKA}$$

## c. Pembahasan

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hipotesis dua, hipotesis empat dan hipotesis lima diterima, hanya saja arah pengaruh untuk hipotesis empat berkebalikan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan demikian hipotesis 1 (*H<sub>1</sub>*) yang menyatakan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan ditolak (*H<sub>1</sub>* ditolak). Berdasarkan hasil penelitian, ukuran Dewan Komisaris pada perusahaan LQ45 tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 menyebutkan Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dengan demikian, ukuran Dewan komisaris yang ditentukan dalam UU tersebut minimal 1 orang Dewan Komisaris dan tidak ada batasan jumlah maksimal, sehingga penentuan ukuran Dewan Komisaris pada perusahaan LQ45 hanya untuk memenuhi regulasi pada UU No 40 tahun 2007.

Hasil pengujian menunjukan bahwa proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dengan demikian hipotesis 2 (*H<sub>2</sub>*) yang menyatakan Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan diterima (*H<sub>2</sub>* diterima). Koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi Komisaris Independen maka semakin rendah

nilai perusahaan. Komisaris independen pada perusahaan LQ45 telah melakukan fungsi pengawasan dengan baik, sehingga pihak independen memberikan kontribusi pengawasan yang kuat tanpa intervensi pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan. Hasil pengawasan Komisaris Independen yang terlalu ketat tidak begitu disukai oleh investor di Indonesia, sehingga hal ini akan berdampak pada turunnya minat investor untuk membeli saham atau berinvestasi pada perusahaan LQ45 dengan proporsi Komisaris Independen yang tinggi. Menurunnya minat investor tersebut menurunkan harga jual saham, sehingga nilai perusahaan menjadi turun.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan demikian hipotesis 3 ( $H_3$ ) yang menyatakan jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan ditolak ( $H_3$  ditolak). Berdasar hasil regresi di atas pengaruh jumlah rapat Dewan Komisaris menunjukkan bahwa jumlah rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan LQ45, hal ini disebabkan fungsi rapat Dewan Komisaris perusahaan LQ45 sebagai pengawas belum berjalan efektif sehingga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Rapat dewan komisaris merupakan rapat antar anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas terhadap manajemen perusahaan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dengan demikian hipotesis 4 ( $H_4$ ) yang menyatakan ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak ( $H_4$  ditolak). Koefisien regresi menunjukkan hasil negatif signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran Komite Audit pada perusahaan LQ45 berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran Komite Audit akan menurunkan nilai perusahaan, demikian sebaliknya jika jumlah komite audit yang lebih kecil dimungkinkan memberikan pengawasan terhadap kepatuhan

menjadi lebih efektif dibandingkan jumlah komite audit yang lebih banyak. Ukuran Komite Audit yang lebih besar menjalankan tugas lebih baik dalam pengendalian internal perusahaan LQ45. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan merupakan salah satu hasil kerja pengendalian internal yang dilakukan Komite Audit. Laporan keuangan riil yang dilaporkan oleh perusahaan menunjukkan posisi keuangan perusahaan sebenarnya. Investor di Indonesia tidak menyukai laporan keuangan riil perusahaan, karena hal ini tidak menguntungkan diri pribadinya, sehingga tidak tertarik untuk berinvestasi. Menurunnya minat investor tersebut akan berdampak pada turunnya harga saham, sehingga nilai perusahaan menjadi turun.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dengan demikian hipotesis 5 ( $H_5$ ) yang menyatakan jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima ( $H_5$  diterima). Rapat Komite Audit merupakan tanggungjawab Komite Audit dalam melaksanakan pengawasan perusahaan termasuk didalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern. Pengaruh positif rapat Komite Audit tersebut disebabkan fungsi rapat Komite Audit perusahaan LQ45 telah berkontribusi efektif dalam pengawasan, sehingga nilai perusahaan meningkat.

## 5. SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan ( $H_1$  ditolak), Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan ( $H_2$  diterima), Jumlah rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan ( $H_3$  ditolak), Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap nilai

perusahaan ( $H_4$  ditolak), Jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ( $H_5$  diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan kepada perusahaan perseroan di Indonesia khususnya yang masuk indeks LQ45, bahwa penerapan *board governance* yang maksimal dalam pelaksanaannya sesuai yang diatur dalam Pedoman *corporate governance* di Indonesia akan mewujudkan *corporate governance* yang baik. Dampak dari *corporate governance* yang baik adalah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan meningkat, seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat akan berpengaruh terhadap meningkatnya harga saham perusahaan sehingga nilai perusahaan akan meningkat.

Keterbatasan penelitian ini yaitu *board governance* dalam penelitian ini hanya terdiri dari Komisaris dan Komite Audit, tahun pengamatan hanya tahun 2008-2012, dan perusahaan yang diteliti hanya pada perusahaan LQ45 sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada perusahaan selain perusahaan LQ45. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan tahun pengamatan yang lebih lama. *Board governance* yang diteliti tidak hanya Dewan Komisaris dan Komite Audit, tetapi ditambah dengan Direksi dan komite-komite lain di bawah Komisaris. Serta sampel penelitian agar lebih luas tidak hanya pada perusahaan LQ45.

## 6. REFERENSI

- Ahmed, Kamran., Mahmud Hossain, dan Mike B Adams. 2006. The Effects of Board Composition and Board Size on the Informativeness of Annual Accounting Earnings. *Corporate Governance: An International Review* 14 (5) : 418-431.
- Al-Matari, Yahya Ali., Abdullah Kaid Al-Swidi., Faudziah Hanim Bt Fadzil., Ebrahim Mohammed Al-Matari. 2012. Board of Directors, Audit Committee Characteristics and Performance of Saudi Arabia Listed Companies. *International Review of Management and Marketing*. 2 (4) : 241-251.
- Abdullah Kaid Al-Swidi., Al-Matari, Yahya Ali., Faudziah Hanim Bt Fadzil., Ebrahim Mohammed Al-Matari. 2012. Board of Directors, Audit Committee Characteristics and Performance of Saudi Arabia Listed Companies. *International Review of Management and Marketing*. 2 (4) : 241-251.
- Babatunde, M. Adetunji dan Olawoye Olaniran. 2009. The Effects of Internal and External Mechanism on Governance and Performance of Corporate Firms In Nigeria. *Corporate Ownership & Control* 7 (2) : 330-344.
- Bauwhede, Heidi Vander. 2009. On The Relation Between Corporate Governance Compliance and Operating Performance. *Accounting and Business Research* 39 (5) : 497-513.
- Beasley, M., Carcello, J., Hermanson, D., dan Lapedes, P. 2000. Fraudulent Financial Reporting: Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanisms. *Accounting Horizons* 14 (4) : 441-454.
- Belkhir, Mohamed. 2009. Board of Directors' Size and Performance In The Banking Industry. *International Journal of Managerial Finance* 5 (2) : 201 - 221.
- Bhagat, Sanjai. dan Brian J. Bolton. 2007. Corporate Governance and Firm Performance. *SSRN-id 1017342*.
- Bouaziz, Zied. 2012. The Impact of the Presence of Audit Committees on the Financial Performance of Tunisian Companies. *International Journal of Management & Business Studies* 2 (4): 57-64.
- Brick, Ivan E. dan N. K. Chidambaran. 2007. Board Meetings, Committee Structure, and Firm Performance. *SSRN-id1108241*.
- Brown, Lawrence D. dan Marcus L. Caylor. 2006. Corporate Governance and Firm Valuation. *J Acc Public Policy* 25 : 409-434.
- Chung, Kee H dan Stephen W Pruitt (1994). A Simple Approximation of Tobin's Q. *Financial Management* 23 (3) : 70-74.

- Dah, Abdallah M., Salaheddine S., dan Ghida F. Matar. 2012. CEO Compensation And Firm Value. *Journal of Business & Economics Research* 10 (12) : 689-694.
- De Andres, P.A., V. Azofra and F. Lopez (2005), Corporate boards in some OECD countries: Size, composition, functioning and effectiveness, *Corporate Governance: An International Review*, 13, 197-210.
- DeFond, Mark L., Rebecca N. Hann, Xuesong Hu. 2004. Does the Market Value Financial Expertise on Audit Committees of Boards of Directors?. *SSRN-id498822*.
- Ehikioya, Benjamin I. 2009. Corporate Governance Structure and Firm Performance in Developing Economies: Evidence from Nigeria. *Corporate Governance* 9 (3) : 231-243.
- Eisenberg, T., Sundgren, S., dan Wells, M. T. 1998. Larger Board Size and Decreasing Firm Value in Small Firms. *Journal of Financial Economics* 48 : 35-54.
- Fama, Eugene F. 1978, The Effect of a Firm Investment and Financing Decision on The Welfare of Its Security Holders. *American Economic Review* 68 : 272-280.
- Fama, Eugene F. and Michael C. Jensen. 1983. Separation Of Ownership And Control. *Journal of Law and Economics*, Vol. XXVI, June.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Seri Tata Kelola Perusahaan Jilid II, Jakarta.
- Francis, Bill., Iftekhar Hasan, dan Qiang Wu. 2012. Do Corporate Boards Affect Firm Performance? New Evidence from The Financial Crisis. *Bank of Finland Research*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawaty, Vinolla. 2008. Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10 (2) : 97-108.
- Hsu, Hsueh-En. 2007. Boards Of Directors and Audit Committees in Initial Public Offerings. DBA Dissertation. Nova Southeastern University.
- Isshaq, Zangina., Godfred A. Bokpin, dan Joseph Mensah Onumah. 2009. Corporate Governance, Ownership Structure, Cash Holdings, and Firm Value On The Ghana Stock Exchange. *The Journal of Risk Finance* 10 (5) : 488-499.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4) : 305-360.
- Koerniadi, Hardjo. Alireza Tourani-Rad. 2012. Does Board Independence Matter? Evidence from New Zealand. *AABFJ* 6 (2).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. KNKG: 1-39
- Kumar, Naveen dan J.P. Singh. 2013. Effect of Board Size and Promoter Ownership on Firm Value: Some Empirical Findings from India. *Corporate Governance* 13 (1) : 88-98.
- Lin, J.W., Li, J.F., & Yang. J.S. (2006). The effect of audit committee performance on earnings quality. *Managerial Auditing Journal* 2 (9) : 921-933.
- Liu, Qiao Chong-En Bai; JoeLu; Frank M. Song; Junxi Zhang. 2002. Corporate governance and market valuation in China. *Journal of Comparative Economics* 32 (2004) 599-616.
- Macey, R. Jonathan and O'Hara, Maureen. 2003. The Corporate Governance of Banks. *Economic Policy Review*, Vol. 9, No. 1.

- Mollah, Sabur., Omar Al Farooque, dan Wares Karim. 2012. Ownership Structure, Corporate Governance and Firm Performance Evidence from an African Emerging Market. *Studies in Economics and Finance* 29 ( 4): 301-319.
- Morck, Randall, Andrei Shleifer and Robert Vishny. 1988. "Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis," *Journal of Financial Economics*, 20: ½, pp. 293-315.
- Ntim, Collins G. dan Kofi A. Osei. 2011. The Impact of Corporate Board Meetings on Corporate Performance in South Africa. *African Review of Economics and Finance* 2 (2).
- OECD. 2001. *Corporate Governance In Asia: A Comparative Perspective*. OECD Publishing, Paris.
- OECD. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*. Publishing, Paris.
- Ojulari, Omolara. 2012. Corporate Governance: The Relationship between Audit Committees and Firm Values. *Management Departmental Seminar Series. Maleté*. Kwara State University.
- Orr, Duncan., David Emanuel, dan Norman Wong. 2005. Board Composition and the Value of New Zealand Companies. *Pacific Accounting Review* 17 (2) : 103-121.
- Siallagan, Hamonangan. Dan Mas'ud Machfoedz. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Suhardjanto D, Dewi A, Rahmawari E, Firazonia M. 2012. Peran Corporate Governance Dalam Praktik Risk Disclosure pada Perbankan Indonesia, *Jurnal Akuntansi & Auditing* 9 (1): 1-96.
- Suhardjanto, D., dan A. N. Afni. 2009. Praktik Corporate Social Disclosure di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 8(3) : 265-279.
- Tong, Shenghui., Eddy Junarsin and Wallace N. Davidson III. 2013. A Comparison of Chinese State-Owned Enterprise Firm's Boards and Private Firm's Boards. *Proceedings of 23<sup>rd</sup> International Business Research Conference*.
- Vafeas, N. 1999. Board Meeting Frequency and Firm Performance. *Journal of Financial Economics* 53: 113 -142.
- Wahyudi, Untung dan Hartini Prasetyaning Prawestri. 2006. *Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening*. IAI. SNA IX.
- Yermack, D., 1996. Higher Market Valuation For Firms With A Small Board Of Directors. *Journal of Financial Economics* 40 : 185–211.